



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTAHANAN RI TAHUN 2013



JAKARTA,

MARET 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i - ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii - vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	1
a. Umum.....	1
b. Maksud dan Tujuan	3
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
a. Kedudukan	4
b. Tugas	4
c. Fungsi	4
3. Struktur Organisasi	5
4. Sistematika Penyajian	6
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
5. Ikhtisar Renstra	7
6. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan (RKT).	9
7. Ikhtisar Penetapan Kinerja (Tapkin/PK).....	9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

8. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
9. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	19
10. Akuntabilitas Keuangan	70

BAB IV : PENUTUP

11. Kesimpulan	75
12. Saran	76

LAMPIRAN :

- **Pengukuran Kinerja Kemhan RI Tahun Anggaran 2013.**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan terus meningkatnya kemampuan anggaran negara, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah mengalokasikan porsi anggaran nasional yang lebih besar untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang diharapkan akan mempercepat program pembangunan *Minimum Essential Force/MEF* (Kekuatan Pokok Minimum) yang telah dicanangkan. Dalam upaya mewujudkan rencana jangka panjang pembangunan MEF ini, pemerintah membagi dalam tiga tahap yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) tahap II (2010-2014), selanjutnya Renstra tahap III (2015-2019) dan terakhir Renstra tahap IV (2020-2024). Pembangunan sistem pertahanan Indonesia yang menganut sistem MEF tersebut merupakan konsep bela negara yang menerapkan prinsip, saat dalam keadaan damai cukup memiliki kekuatan minimum, tetapi dalam keadaan perang dapat dengan cepat dibesarkan kemampuannya dengan cara mobilisasi pasukan. Arah dan fokus program maupun kegiatan pada Renstra tahap ini adalah mencapai MEF dengan titik berat pembangunan dan modernisasi Alutsista beserta teknologinya. Kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan kebutuhan mendesak guna menghadapi ancaman aktual di beberapa *flash point*. Kemhan sebagai Instansi Pemerintah yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam bidang pertahanan negara telah menetapkan visi dan misi pertahanan Indonesia. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan tujuan/*grand strategy* yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan sasaran-sasaran strategik untuk melaksanakan seluruh program kerja dan anggaran.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pertahanan Indonesia. Visi Pertahanan Indonesia adalah:
“Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”.
- b. Misi Pertahanan Indonesia. Misi Pertahanan Indonesia yaitu:
“Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa”.
- c. Tujuan dan Sasaran pada Renstra Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014 adalah:
 1. Memberdayakan wilayah dalam menghadapi ancaman, dengan sasaran:
 - a. Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.

- b. Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.
 - c. Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.
 - d. Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.
 - e. Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
2. Menerapkan Manajemen Pertahanan yang Terintegrasi, dengan sasaran:
- a. Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.
 - b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang *up-to-date* dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
 - c. Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.
3. Meningkatkan Kualitas Personel Pertahanan, dengan sasaran:
- a. Seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.
 - b. Pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.
4. Mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir, dengan sasaran:
- a. Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
 - b. Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.
5. Memantapkan Kemanunggalan TNI Rakyat dalam Bela Negara, dengan sasaran :
- a. Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

- b. Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan maka pada tahun anggaran 2013 ini Kemhan dan TNI menetapkan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan dan Program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dilaksanakan oleh 5 (lima) Unit Organisasi yaitu: U.O Kemhan, U.O Mabes TNI, U.O TNI AD, U.O TNI AL dan U.O TNI AU.

Pada tahun anggaran 2013 ini telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI oleh **Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** berdasarkan surat dari Kemenpan Nomor: B/1732/D.V/PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal: Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Surat Tugas Nomor: ST/05/D.V/PAN-RB/5/2013. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Kementerian Pertahanan. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/3821/M.PANRB/11/2013 tanggal 22 November 2013 Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa salah satu rekomendasinya adalah Kemhan menyempurnakan rumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan di tingkat unit kerja agar memenuhi kriteria suatu indikator yang baik, antara lain yaitu spesifik, terukur, menggambarkan hasil (SMART), serta selaras dengan sasaran yang diukurnya.

Rekomendasi dari Kemen PAN & RB tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kemhan dan hasilnya sudah dikoordinasikan dengan staf dari kementerian PAN & RB dan telah disetujui. Namun rekomendasi tersebut khususnya indikator kinerja **belum dapat digunakan** untuk pembuatan laporan akuntabilitas instansi pemerintah tahun anggaran 2013, hal tersebut **disebabkan target – target indikator kinerja yang baru belum dapat diketahui/ditetapkan dalam dokumen perencanaan**. Meskipun pembuatan LAKIP 2013 menggunakan indikator kinerja yang lama, namun diupayakan indikator kinerja dalam mencapai capaian kinerja mendekati kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sesuai evaluasi dan analisa capaian kinerja terhadap keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, jika dilihat dari hasil seluruh pencapaian kinerja Kemhan dan TNI, dapat disimpulkan bahwa Kemhan dan TNI telah berhasil dengan baik melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dengan akumulasi pencapaian sasaran yang hampir mencapai 100%. Kinerja Kemhan dan TNI

dapat berhasil tentunya karena didukung oleh ketepatan dukungan anggaran dan ketaatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga kinerja sasaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk keberhasilan pencapaian kinerja Kemhan dan TNI tersebut dengan diperolehnya **penghargaan berupa Anugerah TEPPA 2013 dengan predikat memuaskan III dari 86 K/L**. Namun tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa kendala yang mengganggu dalam pencapaian target sasaran sehingga diperlukan beberapa upaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tetap konsisten melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dibidang pembangunan pertahanan negara.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada (personel dan dana) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, dengan fokus pada sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Melakukan pengkajian yang mendalam atas penetapan target indikator kinerja setiap sasaran strategis yang ditetapkan sehingga dapat menghindari adanya capaian kinerja yang ekstrim (tidak logis) di masa mendatang.
4. Lebih serius dalam mewujudkan postur dan struktur pertahanan menuju "*Minimum Essential Force*" (MEF) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal guna mengurangi penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia Alutsista yang sudah tua.
5. Meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dengan mengoptimalkan peran industri nasional melalui peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya yang didukung dengan kebijakan Pemerintah.
6. Merencanakan adanya penambahan alokasi anggaran pada tahun anggaran mendatang untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara berupa sarana dan prasarana pengamanan terutama kapal patroli, *surveillance system*, pos-pos perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka mengurangi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI.
7. Merencanakan adanya peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS khususnya di bidang perumahan, kesehatan, gaji dan tunjangan kinerja yang memadai untuk Tahun 2014.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KEMHAN RI TAHUN 2013**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar belakang.

a. Umum.

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman. Sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer tetapi juga oleh non militer, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tapi juga ancaman non tradisional. Dengan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu dengan yang lain, dengan senantiasa mengindahkan tataran dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Diantara ancaman aktual yang menuntut sinergisme yang tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius pada dua tahun ke depan, adalah ancaman terhadap separatisme, terorisme, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Ancaman aktual maupun ancaman potensial sifatnya militer akan berpengaruh langsung terhadap pertahanan negara, sedangkan ancaman bersifat non militer secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pertahanan negara. Ancaman yang bersifat militer maupun non militer sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan dirumuskan oleh setiap peraturan perundang-undangan. Guna menghadapi berbagai ancaman terhadap pertahanan negara, sangat diperlukan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang sistematis, dengan manajemen dan kepemimpinan yang estafet, serta pengawasan yang terus menerus. Salah satu indikasinya ditunjukkan oleh adanya keterkaitan logis antar tiga faktor kunci dalam pembangunan pertahanan negara. Faktor pertama adalah sasaran strategis (*Strategic objectivitas*)

yang didasari oleh penilaian yang akurat terhadap prioritas ancaman, faktor yang kedua, kemampuan pertahanan (*Defense Capability*) yang dibangun, dibina, dan dipersiapkan, dan faktor ketiga adalah anggaran yang proporsional antara kebutuhan penanganan ancaman aktual dan kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakat yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kondisi geografi Indonesia. Diantara aspek penting yang mempengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan negara Indonesia. Dengan demikian, strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik, geo-ekonomi, dan geososial budaya diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan sosial budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

Dikaitkan dengan luasnya wilayah dan posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia, idealnya Kemhan dan TNI membutuhkan anggaran sekitar Rp. 136 Trilyun pertahun, agar dapat membangun kekuatan dan mengembangkan sistem pertahanan negara Indonesia sesuai harapan. TA. 2013 total anggaran yang diterima oleh Kemhan dan TNI sebesar Rp. 84.946,40 M, dan realisasi anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 80.507,27 M (94,77%). Hal ini berdampak pada pembangunan kekuatan, khususnya modernisasi Alutsista dan infra struktur pertahanan. Dihadapkan pada kondisi alutsista yang rata-rata sudah berusia tua dan kebutuhan yang mendesak modernisasi infra struktur pertahanan, maka jumlah anggaran yang diterima oleh Kemhan dan TNI masih terbilang minim. Untuk menyiasati kondisi keterbatasan anggaran tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemhan dan TNI antara lain adalah: mempertajam skala prioritas, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengawasan serta memantapkan prinsip Tri Matra Terpadu. Selain hal tersebut kebijakan membangun kekuatan pokok *minimum* atau *Minimum Essential Force* (MEF) yang dicanangkan oleh TNI adalah juga jawaban untuk menyiasati kondisi keterbatasan tersebut.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN). Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah wajib menetapkan/merumuskan Rencana Strategis (Renstra). Renstra sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Kemhan RI sebagai salah satu instansi pemerintah telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dan telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Kemhan RI. Renstra dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan acuan selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Renstra ini, Kemhan RI telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi di dalamnya dan *Stakeholder*. Selain dokumen Renstra terdapat dokumen yang lain seperti Perencanaan Kinerja (Renkin), Penetapan Kinerja (Tapkin) untuk perencanaan jangka pendek dan kepastian dalam melaksanakan tugas juga sangat perlu untuk dirumuskan, selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi, mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemhan RI. LAKIP Kemhan RI ini juga berfungsi sebagai umpan balik guna memicu dan memacu perbaikan kinerja Kemhan di tahun yang akan datang.

b. Maksud dan tujuan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Kemhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan Tahun Anggaran 2013, dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

c. Dasar.

- 1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 50 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

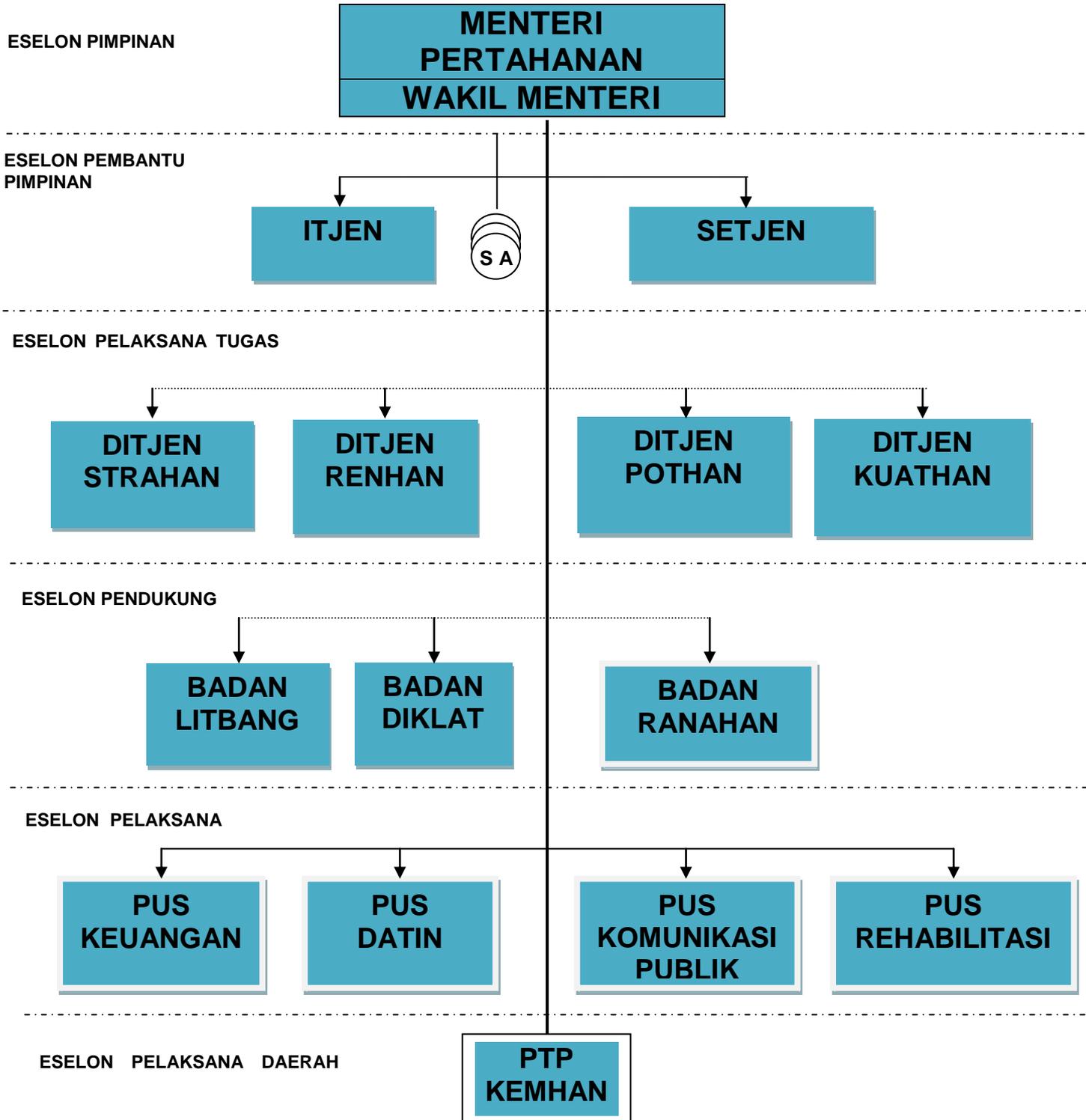
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kemhan sebagai berikut:

- a. **Kedudukan.** Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan Negara dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. **Tugas.** Kemhan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- c. **Fungsi.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pertahanan.
 - 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 - 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara di bidang pertahanan.
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pertahanan.
 - 5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pertahanan kepada Presiden.

3. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 16 tahun 2014 tanggal 27 September 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kemhan yaitu:

STRUKTUR ORGANISASI KEMHAN



4. **Sistematika Penyajian.** LAKIP disusun sebagai gambaran pencapaian kinerja Kementerian Pertahanan RI dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kompilasi laporan pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing UO meliputi UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU. Hal tersebut merupakan implementasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang didalamnya mencerminkan keberhasilan dan kegagalan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Kemhan RI Tahun 2013 disusun sebagai berikut ini:
- a. **Bab I Pendahuluan.** Pada bagian ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
 - b. **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.** Bagian ini menjelaskan Ikhtisar Rencana Strategis Kemhan RI untuk periode 2010 – 2014, Ikhtisar Renkin dan Ikhtisar Tapkin 2013.
 - c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja.** Menjelaskan Capaian Kinerja, Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
 - d. **Bab IV Penutup.** Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemhan RI Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

5. **Ikhtisar Renstra.** Pembangunan pertahanan Negara jangka menengah 5 (lima) tahunan diselenggarakan dalam kerangka pembangunan jangka panjang 20 tahunan. Renstra Pertahanan Negara (Renstra Haneg) Tahun 2010-2014 yang diselenggarakan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang, mengacu kepada RPJM Nasional dimana telah tercantum sasaran pembangunan pertahanan negara dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan pertahanan yang berkelanjutan.



Arah dan fokus program maupun kegiatan pada Renstra tahap ini adalah mencapai MEF dengan titik berat pembangunan dan modernisasi Alutsista beserta teknologinya. Kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan kebutuhan mendesak guna menghadapi ancaman aktual di beberapa *flash point*. Kemhan sebagai Instansi Pemerintah yang mengemban tugas pokok, melaksanakan tugas-tugas dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pertahanan negara telah menetapkan visi dan misi pertahanan Indonesia. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan tujuan/*grand strategy* yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan sasaran-sasaran strategik untuk melaksanakan seluruh program kerja dan anggaran.

Adapun Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pertahanan Indonesia. Visi Pertahanan Indonesia adalah: “Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”.
- b. Misi Pertahanan Indonesia. Misi Pertahanan Indonesia yaitu: “Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa”.
- c. Tujuan dan Sasaran pada Renstra Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014 adalah:
 - 1) Memberdayakan Wilayah dalam menghadapi Ancaman.
 - a) Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.
 - b) Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.
 - c) Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.
 - d) Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.
 - e) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
 - 2) Menerapkan Manajemen Pertahanan yang Terintegrasi.
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.
 - b) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang *up-to-date* dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
 - c) Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.
 - 3) Meningkatkan Kualitas Personel Pertahanan.
 - a) Seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.
 - b) Pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.

- 4) Mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir.
 - a) Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
 - b) Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan iptek serta dikembangkan secara mandiri.
 - 5) Memantapkan Kemanunggalan TNI Rakyat dalam Bela Negara.
 - a) Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
 - b) Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.
- 6. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan (RKT).** RKT tahun 2013 sebagai pelaksanaan/penjabaran dari Renstra Kemhan tahun 2010-2014 berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertahanan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan dan disusun RKT dalam rangka menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Di dalam RKT tersebut ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja sasaran dan kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/457/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Rencana Kinerja Pertahanan Negara Tahun 2012, dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 (empat belas) sasaran strategis dimana didalamnya terdapat 4 (empat) sasaran prioritas tahun 2013 dan 10 (sepuluh) arah kebijakan strategis.
- 7. Ikhtisar Penetapan Kinerja (Tapkin/PK).** Tapkin/PK merupakan pernyataan atau janji dari suatu instansi dalam menetapkan kinerja yang akan dilaksanakannya. Penetapan Kinerja Kemhan dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah berisi pernyataan tentang komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan kinerja aparatur.
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tapkin Kemhan dan TNI tahun 2013 telah ditetapkan dan telah di tandatangani oleh Menteri Pertahanan pada tanggal 4 Maret 2013. Dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Kemhan dan TNI memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama yang akan dilaksanakan oleh lima Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut:

a. Sasaran 1.

Seluruh potensi ancaman, hambatan, tantangan (AGHT) dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu.	%	78

b. Sasaran 2.

Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase wilayah pertahanan yg memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan <i>up-to-date</i> .	%	65

c. Sasaran 3.

Seluruh wilayah terutama daerah terpencil dan perbatasan memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase kelompok masyarakat yang dapat diperdayakan untuk melakukan lapor dini (<i>early warning report</i>) terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang timbul.	%	55

d. Sasaran 4.

Wilayah Laut dan Udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase penyelenggaraan operasi militer perang (OMP) dan penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	92
2.	Persentase penyelenggaraan operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL & TNI AU dalam penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	32

e. Sasaran 5.

Seluruh objek vital nasional yang bersifat yang bersifat strategis aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
	Persentase seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.	%	75

f. Sasaran 6.

Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan Negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta dikembangkan secara sinergi lintas sektor

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplemetasikan secara sinergis lintas sektor.	%	65

g. **Sasaran 7.**

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data *up-to-date* dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Persentase satuan kerja yang menerapkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan Negara.	%	60

h. **Sasaran 8.**

Seluruh satuan kerja menerapkan teknologii informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akuntabel.	%	78

i. **Sasaran 9.**

Seluruh satuan kerja Kemhan/TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kopetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase satuan kerja UO Kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	%	80
2.	Persentase satuan-satuan kerja TNI yang memiliki personel sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam TOP/DSPP.	%	22

j. Sasaran 10.

Pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase penyelenggaraan pendidikan tinggi Pertahanan.	%	80

k. Sasaran 11.

Sistem persenjataan dengan menerapkan teknologi mutakhir dan mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase produk Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan Pinak industri pertahanan.	%	30

l. Sasaran 12.

Sarana prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan <i>prototype</i> .	%	40

m. Sasaran 13.

Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela Negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase komponen masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjadi relawan ketika terdapat indikasi terganggunya kedaulatan Negara.	%	85
2.	Persentase komponen pendukung yang dipetakan dan dibina secara terintegrasi dengan data yang <i>up to date</i> , akurat dan siap digunakan.	%	40

n. Sasaran 14.

Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat regional dan internasional.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Persentase keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional	%	45

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kemhan RI pada tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan dengan baik, seluruh target-target kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana yang diharapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemhan RI TA. 2012 juga telah dilaksanakan evaluasi oleh **Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi** berdasarkan surat dari Kemenpan Nomor: B/1732/D.V/PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal: Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Surat Tugas Nomor: ST/05/D.V/PAN-RB/5/2013. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Kemhan. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/3821/M.PANRB/11/2013 tanggal 22 November 2013 Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun **rekomendasi** yang diberikan oleh **Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi** sebagai berikut:

1. Agar Kemhan menyempurnakan rumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan di tingkat unit kerja agar memenuhi kriteria suatu indikator yang baik, antara lain yaitu spesifik, terukur, menggambarkan hasil (SMART), serta selaras dengan sasaran yang diukurnya.
2. Agar dilakukan pemantauan/monitoring atas pencapaian dokumen PK secara berkala.
3. Agar dokumen Rencana Aksi mencantumkan target sebagaimana dalam dokumen PK secara periodik dan mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci yang akan dilakukan pada setiap periode.
4. Agar dipertimbangkan untuk menerapkan system pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi yang selanjutnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, dsb.

Rekomendasi dari Kemen PAN & RB tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kemhan dan hasilnya sudah dikoordinasikan dengan staf dari kementerian PAN & RB dan telah disetujui. Namun rekomendasi tersebut khususnya indikator kinerja **belum dapat digunakan** untuk pembuatan laporan akuntabilitas instansi pemerintah tahun anggaran 2013, hal tersebut **disebabkan target – target indikator kinerja yang baru belum dapat diketahui/ditetapkan dalam dokumen perencanaan**. Meskipun pembuatan LAKIP 2013 menggunakan indikator kinerja yang lama, namun diupayakan indikator kinerja dalam mencapai capaian kinerja mendekati kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun Indikator kinerja yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	<p>Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan.</p> <p>Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti.</p>
2.	Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.	<p>Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas.</p> <p>Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan.</p>

1	2	3
3.	Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.	Persentase seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga.
4.	Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional.
5.	Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman.	Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman.
6.	Sistem Pertahanan Negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
7.	Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek. Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI merupakan wujud pertanggungjawaban Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut Kemhan dan TNI telah menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran Strategis, dimana untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut Kemhan dan TNI telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh 5 (lima) Unit Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara umum sasaran-sasaran Kemhan dan TNI telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan. Akuntabilitas Kinerja secara sistematis meliputi pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

- 8. Capaian Indikator Kinerja Utama.** Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian IKU Kemhan dan TNI menjadi tolok ukur keberhasilan dari seluruh program kegiatan yang ada, sehingga menjadi target utama dari kinerja Kemhan dan TNI. Namun demikian tentunya tidak mengesalkan semua program kegiatan yang lain. Pengukuran capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi masing-masing indikator.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing sasaran, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu.	%	78	78	100
2.	Persentase wilayah pertahanan yg memiliki batas yg jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yg terintegrasi, akuntabel dan <i>up-to-date</i> .	%	65	65	100
3.	Persentase kelompok masyarakat yang dapat diperdayakan untuk melakukan lapor dini (<i>early warning report</i>) terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang timbul.	%	55	55	100

4.	Persentase penyelenggaraan operasi militer perang (OMP) dan penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	92	92	100
5.	Persentase penyelenggaraan operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL & TNI AU dalam penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	32	32	100
6.	Persentase seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.	%	75	75	100
7.	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimple-metasikan secara sinergis lintas sektor.	%	65	65	100
8.	Persentase satuan kerja yang menerapkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.	%	60	60	100
9.	Persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akuntabel.	%	78	78	100
10.	Persentase satuan kerja UO Kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	%	80	80	100
11.	Persentase satuan-satuan kerja TNI yang memiliki personel sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam TOP/DSPP.	%	22	22	100
12.	Persentase penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan.	%	80	80	100
13.	Persentase produk Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan Pinak industri pertahanan	%	30	30	100

14.	Persentase rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan lptek serta mampu dijadikan <i>prototype</i> .	%	40	40	100
15.	Persentase komponen masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjadi relawan ketika terdapat indikasi terganggunya kedaulatan Negara.	%	85	85	100
16.	Persentase komponen pendukung yang dipetakan dan dibina secara terintegrasi dengan data yang <i>up to date</i> , akurat dan siap digunakan.	%	40	40	100
17.	Persentase keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional.	%	45	45	100

9. **Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.** Program kerja Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan pada TA. 2013 telah terlaksana seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, walaupun tidak dapat dihindari ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Kemhan dan TNI Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin/PK) TA. 2013 dengan realisasi yang telah dicapai sesuai masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya Kemhan dan TNI telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, agar terdapat perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan program kerja berikutnya.

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja terhadap keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, jika dilihat dari hasil seluruh pencapaian kinerja Kemhan dan TNI, dapat disimpulkan bahwa Kemhan dan TNI telah berhasil dengan baik melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dengan akumulasi pencapaian sasaran yang hampir mencapai 100%. Kinerja Kemhan dan TNI dapat berhasil tentunya karena didukung oleh ketepatan dukungan anggaran dan ketaatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga kinerja sasaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk keberhasilan pencapaian kinerja Kemhan dan TNI tersebut dengan diperolehnya **penghargaan berupa Anugerah TEPPA 2013 dengan predikat memuaskan III dari 86 K/L.**

Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

a. Sasaran 1:

Seluruh Potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu.	%	78	78	100



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran khususnya tujuan yang pertama yaitu memberdayakan wilayah dalam menghadapi ancaman, dengan sasaran yang pertama yaitu seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif maka Kemhan dan TNI melaksanakan kegiatan baik didarat maupun di laut dan di udara khususnya di wilayah corong-corong strategis perairan Natuna, Laut Sulawesi/Blok Ambalat, Selat Malaka serta perairan perbatasan Australia/Timor Leste dapat dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif dengan melaksanakan spionase berupa kegiatan yang bersifat *Outward looking* untuk mencari, mengumpulkan data mandala laut dan

aspek kemaritiman lawan/bakal lawan yang berpotensi menjadi ancaman di seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional, melaksanakan sabotase untuk melemahkan lawan/bakal lawan melalui penghambatan, pengacauan atau penghancuran, melaksanakan terror untuk mengintimidasi dan memprovokasi lawan/bakal lawan dalam rangka cipta kondisi dengan mengoptimalkan integrasi komunikasi, penerangan dan psikologi serta melaksanakan kontra intelijen berupa kegiatan yang bersifat *inward looking* dengan mengintegrasikan sistem pengamanan personel, materiil, dokumen, kegiatan dan berita dengan satuan/instansi terkait.

Adapun sebagian operasi intelijen yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Operasi Intelmar Tongkol-13 melalui pengumpulan data kegiatan terhadap pelaku, jaringan dan kegiatan illegal fishing dan illegal lainnya di perairan Natuna, Ternate, Laut Sulawesi dan perairan Tarempa.
- 2) Operasi intelmar Pari-13 melalui kegiatan pengumpulan data terhadap pelaku, jaringan dan area operasi penyelundupan BBM, narkoba, senjata, *human trafficking* dan lain-lain di perairan Nunukan, Kotabaru, Kepulauan Riau, dan Dumai.
- 3) Operasi lidmar Mawar-13 melalui pengumpulan data intel di wilayah perairan Malaysia khususnya perairan Ambalat dan laut sekitarnya.
- 4) Operasi lidmar Cindai-13 melalui kegiatan pengumpulan data intel di wilayah pertahanan RI di Laut Cina Selatan.

Selain kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TNI AL seperti tersebut diatas Kemhan dan TNI juga melaksanakan:

- 1) Menggelar operasi intelijen strategis oleh Bais TNI dengan melaksanakan operasi penyelidikan, kontra intelijen dan penggalangan, dengan membentuk:
 - a) Satgas Intelijen Rencong 2013 di wilayah Sumatera.
 - b) Satgas Intelijen Keris 2013 di wilayah Jawa dan Bali.
 - c) Satgas Intelijen Mandau 2013 di Kalimantan dan Nusa Tenggara.
 - d) Satgas Intelijen Guma 2013 di Sulawesi dan Maluku.
 - e) Satgas Intelijen Tombak 2013 di wilayah Papua dan Papua Barat.
- 2) Melaksanakan kegiatan intelijen daerah (intelijen taktis) oleh seluruh Kotamaops TNI.

Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut atau capaian kinerja yang berupa **Outcome** adalah sebagai berikut:

- 1) Operasi Intelijen Strategis Bais TNI
 - a) Penyelidikan.
 - (1) Terorisme
 - (a) Terdeteksinya jaringan kelompok teroris dan kelompok Islam radikal di seluruh wilayah Indonesia.

- (b) Terdeteksinya rencana aksi teror yang dilakukan oleh kelompok radikal.
 - (2) Separatisme. Terdeteksinya jaringan separatisme dan pendukungnya serta kegiatan yang berpotensi menjadi embrio separatis.
 - (3) Pemberontakan bersenjata. Terdeteksinya ancaman pemberontakan bersenjata dan jaringan pendukungnya serta kegiatan yang berpotensi menjadi pemberontakan bersenjata.
 - (4) Radikalisme:
 - (a) Terdeteksinya jaringan dan gerakan kelompok Islam fundamentalis, khususnya kelompok yang memanfaatkan jalur politik yang memperjuangkan ideologinya.
 - (b) Terdeteksinya jaringan dan gerakan kelompok Sosialis Komunis yang berpotensi mendegradasi ideologi Pancasila.
 - (c) Terdeteksinya jaringan dan gerakan kelompok kepentingan lainnya yang berupaya mendelegitimasi kekuasaan pemerintah yang sah.
 - (5) Ancaman terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Terdeteksinya jaringan dan gerakan kelompok kepentingan lainnya yang berupaya mendelegitimasi kekuasaan pemerintah yang sah yang dapat mengancam pribadi dan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - (6) Konflik komunal. Terdeteksinya seluruh elemen konflik yang berpotensi dapat memicu timbulnya konflik komunal dan konflik lainnya.
- b) Pengamanan/kontra intelijen
- (1) Terpeliharanya keamanan wilayah perbatasan terhadap kegiatan intelijen pihak asing, *Transnational Crime*, Narkoba dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pemerintah RI;
 - (2) Terpeliharanya keamanan Obyek vital nasional yang bersifat strategis terhadap kegiatan sabotase lawan.
 - (3) Terjaganya keamanan pribadi dan kegiatan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
- c) Penggalangan
- (1) Wilayah Aceh
 - (a) Terpeliharanya kelangsungan MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian Aceh dan mengakui Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

- (b) Terpelihara dan meningkatnya peran kelompok masyarakat yang menentang tumbuh dan berkembang ide separatis di Provinsi NAD.
 - (c) Terwujudnya jiwa nasionalisme pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para pendidik untuk mencegah upaya referendum.
 - (d) Terwujudnya perubahan organisasi KPA (eks GAM) menjadi organisasi kemasyarakatan.
 - (e) Tercegahnya infiltrasi pihak asing yang akan melakukan kegiatan cipta kondisi untuk kepentingannya sehingga mengganggu stabilitas keamanan di Provinsi Aceh.
 - (f) Terpeliharanya jiwa nasionalisme dikalangan generasi muda lainnya untuk mempertahankan keutuhan NKRI.
 - (g) Terpeliharanya jiwa nasionalisme masyarakat dari pengaruh negatif kegiatan LSM asing di Provinsi Aceh.
 - (h) Tercegahnya infiltrasi pihak asing yang dapat mempengaruhi Pemerintahan Aceh yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- (2) Wilayah Perbatasan
- (a) Terpeliharanya rasa nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara serta tanggungjawab masyarakat sebagai WNI di daerah perbatasan.
 - (b) Terpeliharanya ketahanan terhadap pengaruh kegiatan intelijen pihak asing, *Transnational Crime*, Narkoba dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pemerintah RI.
 - (c) Terpeliharanya partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap patok serta wilayah perbatasan.
 - (d) Lemahnya motivasi sasaran perorangan dan kelompok untuk memperjuangkan aspirasinya yang merugikan NKRI.
 - (e) Termotivasinya aparat Pemerintah/Instansi untuk melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan.
- (3) Wilayah Sulawesi Tengah
- (a) Terpeliharanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan guna terselenggaranya pembangunan dan terlaksananya roda pemerintahan yang lancar dan aman di Provinsi Sulawesi Tengah.
 - (b) Tercegahnya aksi teror dari kelompok tertentu yang mengancam ketentraman kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

- (c) Terpelihara dan meningkatnya kerukunan umat beragama serta mengeliminasi pengaruh-pengaruh dari kelompok kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan instabilitas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - (d) Timbulnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Jatmuhandak pasca konflik yang masih tersimpan dan terungkapnya jalur penyelundupan senjata api dan handak dari luar negeri maupun pengiriman senjata ilegal dari daerah-daerah rawan lainnya.
 - (e) Tercegahnya potensi konflik komunal serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.
- (4) Wilayah Papua dan Papua Barat
- (a) Terpeliharanya stabilitas Politik dan Keamanan yang berkelanjutan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - (b) Terbinanya masyarakat pro NKRI agar tetap setia dan turut serta mempengaruhi sasaran hitam maupun abu-abu menjadi putih.
 - (c) Meningkatnya keberanian masyarakat untuk menentang ide separatis dalam memperjuangkan aspirasinya yang merugikan NKRI.
 - (d) Terwujudnya pemahaman positif masyarakat Papua tentang kebijakan Otsus dan program UP4B.
 - (e) Tercegahnya infiltrasi pihak asing yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - (f) Tercegahnya pemberitaan media massa lokal dan nasional yang berpotensi memprovokasi masyarakat Papua.
 - (g) Tercapainya organisasi kemasyarakatan yang semakin kuat menentang ide separatis Papua.
- 2) Kegiatan intelijen taktis/Intelda Kotamaops TNI
- a) Termonitornya kelompok radikal kanan, radikal kiri dan radikal lainnya yang mengkritisi pemerintah terkait beberapa kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk menyudutkan pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap gagal dalam menjalankan amanah rakyat;
 - b) Termonitornya potensi kerawanan pasca pelaksanaan Pilkada.
 - c) Terlaksananya penyelidikan dan kemampuan deteksi dini terhadap eskalasi/spektrum kontijensi sosial.
 - d) Tercegahnya radikalisme dan kebrutalan/kerusuhan massa.

- e) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan di wilayah.
- f) Termonitornya aksi unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkhis seperti kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan petani.
- g) Terlaksananya pendataan, deteksi dini dan cegah dini terhadap kelompok Raka, Raki dan Rala yang dapat menimbulkan ancaman serius di wilayah.
- h) Terpantaunya secara terus menerus pengamanan terhadap personel, materiil, berita, keuangan, obyek vital pemerintah/militer terhadap ancaman/sabotase/teror dari pihak lawan.
- i) Tergalangnya tokoh-tokoh yang dianggap radikal baik dikalangan aktivis, agama maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
- j) Terdeteksinya secara dini setiap potensi kerawanan terhadap stabilitas keamanan di wilayah dan kerawanan terkait pengamanan tubuh.
- k) Teridentifikasi dan terpetakannya seluruh potensi AGHT di wilayah sehingga memudahkan Pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- l) Tercegahnya dan terbatasnya ruang gerak/aktivitas pergerakan kelompok terorisme, radikalisme, separatisme dan kerawanan lainnya agar tercipta situasi aman dan kondusif di wilayah sehingga pembangunan diseluruh sektor dapat berjalan.
- m) Terlokalisirnya kerawanan atau masalah-masalah yang berkembang agar dapat dinetralisir dan tidak meningkat menjadi ancaman nyata.
- n) Terbentuknya dan terpeliharanya jaring intelijen untuk mencegah terjadinya permasalahan sosial di wilayah.
- o) Terlaksananya pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat Injasmar maupun institusi lainnya yang berada di sekitar pelabuhan, sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang adanya tindakan pelanggaran maupun gangguan keamanan di laut.
- p) Terlaksananya kegiatan Puldata angkutan laut nasional secara periodik dalam rangka pemutakhiran data.
- q) Terbekalnya UUK/PIL kepada para Komandan Unsur/KRI yang akan melaksanakan operasi/pelayaran sebagai Bapul *Mobile* di daerah operasi untuk mengetahui kondisi dan karakteristik daerah terutama cuaca, medan dan musuh.
- r) Terlaksananya kegiatan pemantauan terhadap penerbangan pesawat asing *non schedule* yang memasuki wilayah Indonesia baik yang melintas maupun mendarat.
- s) Pembuatan laporan atensi tentang pelanggaran wilayah udara dan atau penerbangan yang tidak dilengkapi *flight clearance* yang dilakukan oleh pesawat asing *non schedule*.
- t) Terlaksananya kegiatan pengamanan pada setiap penerbangan VIP/VVIP serta penerbangan terjadwal.

Output maupun *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran 1 (satu) pada TA. 2013 dapat disimpulkan meningkat capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan T.A 2012, hal tersebut dapat terlaksana dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tahun 2012 dapat diminimalkan. Salah satu contoh kenaikan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	2012	2013
1	2	3	4
1.	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (ukuran produktifitas dihitung dari jumlah laporan intelijen yang dihasilkan).	25	30
2.	Jumlah produk intelijen ditindaklanjuti/diteruskan/disajikan kepada pengguna (secara tidak langsung menggambarkan kualitas laporan dari segi keakuratan dan waktu prediksi).	15	20

Capaian kinerja yang dapat meningkat capaian kinerjanya tersebut diatas antara lain disebabkan oleh:

- 1) Secara operasional, tugas pokok dapat dilaksanakan sesuai program kerja.
- 2) Telah terbentuknya jaring agen disetiap wilayah, baik jaring terbuka maupun tertutup.
- 3) Telah terbinanya tokoh-tokoh masyarakat, agama dan adat.
- 4) Rata-rata operasi intelstrat Bais TNI maupun kegiatan intelijen daerah Kotamaops TNI bersifat simultan, yakni merupakan kelanjutan operas/kegiatan sejenis sebelumnya, sehingga Satgas telah memiliki data awal tentang obyek.

Sedangkan capaian kinerja yang tidak dapat ditingkatkan capaian kinerjanya antara lain disebabkan oleh:

- 1) Dari aspek operasionil, hasil yang dicapai masih belum optimal, hal tersebut disebabkan luas wilayah dan tanggung jawab penugasan.
- 2) Dari aspek personel, baik kuantitas maupun kualitas personel intelijen di seluruh Kotamaops TNI masih kurang dan masih ditemukan aparat intelijen yang belum kursus intelijen dasar.
- 3) Dari aspek sarana dan prasarana khususnya alat komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas.
- 4) Dari aspek dukungan anggaran, dapat dinilai masih sangat terbatas dihadapkan dengan wilayah tanggung jawab.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Rencana penyelenggaraan operasi didasarkan atas prediksi ancaman dan lebih dititikberatkan pada daerah dan sasaran yang terpilih.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dalam tugas (*in service training*) dan mengoptimalkan pelaksanaan latihan pratugas, guna meningkatkan kualitas personel.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana secara umum terutama Alkapsus, Alkomsus dan Matsus yang bersifat personal untuk mendukung operasi yang sangat terbatas, sementara dapat disiasat dengan mengandalkan *human intelligenc*.

b. Sasaran 2.

Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan <i>up-to-date</i> .	%	65	65	100



Dalam rangka terselenggaranya pengamanan di seluruh sektor khususnya di daerah perbatasan dan untuk memantau terjaminnya keamanan batas wilayah dan pelanggaran wilayah di sekitarnya, Kemhan dan TNI telah menggelar beberapa operasi baik itu di darat, laut maupun di udara. Pelaksanaan kegiatan operasi tersebut dilaksanakan oleh seluruh Kodam, Amabar/tim dan Koopsau 1 & 2 dengan sasaran wilayah perbatasan negara darat, laut, udara dan pulau terluar serta daerah terpencil dengan kegiatan Operasi sebagai berikut:

- 1) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan Darat: Perbatasan Darat RI-Malaysia, di Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Kodam VI/MIW, di Kalimantan Barat oleh Kodam XII/Tpr, perbatasan darat RI-RDTL oleh Kodam IX/Udy dan perbatasan darat RI-PNG oleh Kodam XVII/Cen masing-masing selama 365 hari.
- 2) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan Laut: Perbatasan Laut RI-India (Patkor Indindo), RI-Malaysia (Patkor Malindo dan Optima), RI-Singapura (Patkor Indosin) dan RI-Malaysia-Singapura-Thailand (Patkor *Malacca Strait Sea Patrol*). Dilaksanakan oleh Koarmabar
- 3) Operasi *Eye in the Sky (EiS)*. Dilaksanakan oleh Koopsau I selama 248 hari.
- 4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan Laut: RI-RDTL-Australia dan Patkor Ausindo serta RI-Philipina. Dilaksanakan oleh Koarmatim.
- 5) Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar. Pengamanan Pulau Rondo, dilaksanakan oleh Kodam IM, Pulau Berhala, Nipah dan Sekatung oleh Kodam I/BB, Pulau Miangas, Marore dan Marampit oleh Kodam VII/Wrb, Pulau Danarote dan Batek oleh Kodam IX/Udy, Pulau Fani, Bras dan Fanildo oleh Kodam XVII/Cen selama 365 hari.
- 6) Operasi didaerah rawan. Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata. Dengan menggelar Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara oleh KodamXVI/Pattimura, di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat oleh Kodam XVII/Cenderawasih.

Hasil operasi dari Sasaran ini (*Output*) atau Realisasi (capaian) kinerja untuk untuk wilayah perbatasan negara darat, laut, udara dan pulau terluar serta daerah terpencil dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Hasil Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perairan dan perbatasan. Darat. Secara umum operasi dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Hasil yang dicapai di perbatasan RI-Malaysia dapat memantau dan mencatat TKI ilegal yang dideportasi oleh Malaysia 583 orang, penyelundupan Miras 246 botol serta menangkap shabu-shabu/narkotika seberat 52,8 gram. Sedangkan di perbatasan RI-RDTL dapat menggagalkan penyelundupan 23 kasus, perdagangan bebas ilegal 13 kasus, menyita/mengamankan 6 pucuk senjata, 5 buah granat dan 183 butir munisi.

- 2) Hasil Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perairan dan perbatasan Laut (dilaksanakan oleh Koarmabar/tim), dengan hasil operasi:
 - (a) Terpetakannya kedalaman, arus, pasang surut dan gelombang di perairan Jayapura, Nias, Tg. Sengkuang Batam, Pulau Fani, Kupang, Pulau Kisar, Fakfak, Senginap Natuna, Kolam koarmatim, Kendari, Sibolga, Dumai, Benoa Bali, Tarakan, Karang siboko Kaltim, Asembagus Jatim, Pulau Setoko Batam, Ambon, Palu, Balikpapan, Teluk Bone, Palembang dan Ambon.
 - (b) Memeriksa 922 kapal, diijinkan melanjutkan pelayaran karena persyaratan lengkap 920 kapal dan 2 kapal dalam proses hukum.
- 3) Hasil Operasi dalam rangka *Eye in the Sky (EiS)* (dilaksanakan oleh Koopsau I& 2). Hasil operasi dapat mendeteksi dan memfoto 179 kapal terdiri dari 54 kapal dagang, 86 kapal nelayan dan 39 kapal lain-lain.
- 4) Hasil Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perairan dan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia dan Patkor Ausindo serta RI-Philipina (Patkor Philindo) dilaksanakan oleh Koarmatim memeriksa 5 kapal dan diijinkan melanjutkan pelayaran karena persyaratan lengkap.
- 5) Hasil Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar. Pengamanan Pulau Rondo, dilaksanakan oleh Kodam IM, Pulau Berhala, Nipah dan Sekatung oleh Kodam I/BB, Pulau Miangas, Marore dan Marampit oleh Kodam VII/Wrb, Pulau Danarote dan Batek oleh Kodam IX/Udy, Pulau Fani, Bras dan Fanildo oleh Kodam XVII/Cen selama 365 hari. Pelaksanaan pengamanan secara terpadu oleh personel TNI AD (Kodam) dan TNI AL (Marinir). Wilayah udara di atas pulau-pulau tersebut diamankan oleh Koopsau I dan II selama 60 hari. Amannya pulau-pulau terluar dari ancaman dan kegiatan illegal.
- 6) Hasil Operasi Teritorial Wilayah Perbatasan Nasional.
 - a) Terkumpulnya data Potwil dan data geo, demo, Konsos terkini (terbaru), data desa-desa serta peta-peta kecamatan wilayah perbatasan Kobalima Timur, Oepolli dan Alor (NTT), Ranai (Natuna, Kepri), Pulau Sebatik dan Sebuk (Nunukan Kaltim), Sota dan Pegunungan Bintang (Papua), serta Sajingan (Sambas, Kalbar).
 - b) Terjalannya koordinasi dengan Satkowil dan Pemda perbatasan terkait pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Puldater kewilayah perbatasan Kec. Kobalima Timur Kab. Belu (NTT), Ranai, Kab. Natuna (Kepri), P. Sebatik, Kab. Nunukan (Kaltim), Kec. Sota Kab. Merauke dan wilayah perbatasan Oepolli Kab. Kupang (NTT).
 - c) Terkumpulnya data permasalahan territorial yang menonjol yang memerlukan perhatian bersama dari kementerian/instansi terkait termasuk dari TNI agar dapat ditangani secara terpadu dan berkesinambungan.

- 7) Hasil Operasi Pam Rahwan, Hasil Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata. Operasi di wilayah Kodam XVII/Pattimura 90 pucuk senjata dan 489 butir munisi dari berbagai kaliber. Kodam XVII/Cenderawasih 2 orang GPK tewas, 1 orang ditangkap, senjata 6 pucuk dan munisi 28 butir. Kerugian personel 4 orang meninggal, 9 orang luka-luka.

Realisasi (capaian) indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara kuantitatif dapat dilaporkan meningkat, hal tersebut disebabkan selain kegiatan saat ini merupakan tahun keempat dari Renstra 2010-2014, juga koordinasi dari ketiga angkatan sangat solid dan terkoordinasi dengan baik. Capaian kinerja yang memuaskan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

- 1) Operasional, tugas pokok dapat dilaksanakan sesuai program kerja.
- 2) Telah dipahaminya dan dilaksanakannya management operasi militer secara baik oleh Kotama Operasi.
- 3) Telah dilaksanakannya direktif dari Komando atas secara baik.
- 4) Terdukungnya anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.
- 5) Tercapainya beberapa kesepakatan teknis penetapan batas wilayah negara.

Sedangkan capaian kinerja yang kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh:

- 1) Dari aspek operasional, hasil yang dicapai masih belum optimal hal tersebut disebabkan luas wilayah dan tanggung jawab penugasan.
- 2) Dari aspek personel, baik kuantitas maupun kualitas personel Staf Operasi di seluruh Kotamaops TNI masih kurang memahami bahasa Inggris.
- 3) Dari aspek sarana dan prasarana khususnya Alkom dan Alutsista masih sangat terbatas.
- 4) Dari aspek dukungan anggaran, dapat dinilai masih sangat terbatas dihadapkan dengan wilayah dan tanggung jawab.
- 5) Luas dan panjangnya wilayah perbatasan serta keterbatasan anggaran untuk pembangun infrastruktur.
- 6) Kejahatan lintas Negara akibat banyaknya jalan tikus sehingga banyak jalur ilegal, kurangnya sarana dan prasarana Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Rencana penyelenggaraan operasi didasarkan atas prediksi ancaman dan lebih dititikberatkan pada daerah dan sasaran yang terpilih.

- 2) menyelenggarakan pendidikan dalam tugas (*in service training*) dan mengoptimalkan pelaksanaan latihan pratugas, guna meningkatkan kualitas personel.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana secara umum terutama Alkapsus, Alkomsus dan Matsus yang bersifat personal untuk mendukung operasi yang sangat terbatas, sementara dapat disiasat dengan mengandalkan *human intelligence*.
- 4) Mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan anggaran operasional kepada pemerintah.

c. Sasaran 3.

Seluruh wilayah terutama daerah terpencil dan perbatasan memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase kelompok masyarakat yang dapat diperdayakan untuk melakukan lapor dini (<i>early warning report</i>) terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang timbul.	%	55	55	100



MENHAN MENINJAU POS PERBATASAN PULAU SEKATUNG RIAU

Ketahanan yang tangguh adalah suatu keniscayaan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman yang timbul. Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan Sishanta (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta) dimana seluruh rakyat Indonesia wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pertahanan negara yang tangguh tidak terlepas dari kualitas masyarakat Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas manusia adalah sarana pendidikan yang memadai, sarana kesehatan yang memadai, kesempatan kerja yang luas, pendidikan moral, budaya dan kebangsaan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Disinilah Kemhan dan TNI akan berperan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dhi sasaran 3 (tiga) yaitu seluruh wilayah terutama daerah terpencil dan perbatasan memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul. Dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki daya tangkal dan handal dalam menghadapi ancaman yang timbul maka pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menetapkan beberapa kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Kabinet Indonesia Bersatu ke II (KIB II) memegang konsep bahwa daerah perbatasan dan pulau kecil terluar adalah halaman depan negara. Kalau dulu kita melihat daerah perbatasan itu halaman belakang, sekarang ini daerah perbatasan harus kita lihat sebagai halaman depan kita, artinya sesuatu yang harus dan perlu untuk kita perhatikan dan kita kembangkan.
- 2) Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Dalam penyelenggaraannya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional, disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- 3) Kegiatan Sosialisasi Program Bakti TNI di bidang teritorial yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh satuan jajaran TNI.
- 4) Kebijakan bidang bela negara dalam rangka penanaman kesadaran, hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara diperlukan pembinaan dan pelatihan bela negara kepada seluruh komponen bangsa melalui jalur lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Guna mengoptimalkan penanaman hak dan kewajiban tersebut diperlukan peran TNI sebagai komponen utama yang telah berpengalaman dalam melatih bela negara pada seluruh komponen bangsa terutama daerah terpencil dan wilayah perbatasan.
- 5) Memantapkan sistem pertahanan negara di daerah melalui pembinaan kemampuan bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat guna menjamin tetap tegaknya keutuhan NKRI.

- 6) Tidak hanya masalah keamanan saja yang diperhatikan tetapi juga masalah ekonomi dan kesejahteraan. Karena kalau ini dapat dikembangkan maka secara otomatis pembangunan ekonomi akan mendorong ketahanan ekonomi yang selanjutnya dapat menciptakan atau mewujudkan ketahanan nasional serta memperkuat pertahanan negara.
- 7) Prinsip kedepan adalah masalah keamanan dan kesejahteraan itu menjadi satu yang harus dikembangkan untuk daerah daerah perbatasan. Sehingga pentingnya suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk dapat mendorong investasi di daerah perbatasan.
- 8). Sosialisasi bela negara bagi anggota DPRD, aparat pemerintah, tokoh masyarakat untuk mempercepat penyebarluaskan kesadaran bela negara ke berbagai lapisan masyarakat agar bela negara menjadi landasan bersikap dan bertindak dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas selanjutnya diimplemetasikan menjadi kegiatan-kegiatan pelatihan bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah termasuk Kemhan dan TNI. Agar dalam pelatihan bela negara dapat terlaksana dan tercapai seperti yang direncanakan maka perlu kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelatihan tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelatihan bela negara antara lain:

- 1) Pendidikan kewarganegaraan di strata sekolah
- 2) Workshop bela negara pada semua lapisan masyarakat.
- 3) Seminar-seminar bela negara pada semua lapisan masyarakat.
- 4) Pembangunan nyata di segala aspek kehidupan pada daerah terpencil dan perbatasan.
- 5) Pembangunan pos-pos keamanan dengan menempatkan satuan anggota TNI.
- 6) Adanya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan baik dari pemerintah pusat atau daerah terhadap pelaksanaan pembangunan dan perkembangan daerah terpencil dan perbatasan.

Dari kegiatan-kegiatan pelatihan bela negara tersebut diharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil atau perbatasan dapat mempunyai nilai positif yang dapat dikembangkan dari pelatihan bela negara diantaranya:

- 1) Tertanamnya rasa disiplin di kalangan masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan di rumah tangga, masyarakat dan lingkungan pekerjaan.
- 2) Tumbuh jiwa korsa diantara anggota masyarakat sebagai modal dasar untuk memupuk dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

- 3) Tumbuhnya rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan.
- 4) Meningkatnya rasa cinta tanah air sebagai modal dasar pembangunan nasional.
- 5) Meningkatnya jiwa patriotisme, semangat pantang menyerah, rela berkorban di masyarakat dalam bela negara di segala bidang.
- 6) Tumbuhnya kepekaan untuk membentengi diri terhadap pengaruh dari luar yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.
- 7) Meningkatnya pemahaman tentang pengaruh asing yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan mengancam keselamatan.
- 8) Tumbuhnya jiwa militansi bangsa dalam menghadapi ancaman dari luar.

Dengan telah tertanamnya nilai-nilai positif dari pelatihan bela negara maka dapat dipastikan bahwa masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil dan perbatasan dapat diandalkan dalam melakukan laporan ini apabila ada ancaman yang timbul.

c. Sasaran 4.

Wilayah Laut dan Udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penyelenggaraan operasi militer perang (OMP) dan penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	92	92	100
2.	Persentase penyelenggaraan operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL & TNI AU dalam penegakkan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	%	32	32	100



Untuk mencapai sasaran yang keempat, Kemhan telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja seperti tersebut diatas yaitu pencapaian penegakkan hukum dan terjaminnya keamanan wilayah yurisdiksi nasional. Dua hal tersebut harus dapat diraih oleh Kemhan dan TNI dengan segala permasalahan yang ada. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang diimplementasikan dalam gelar Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam bentuk penangkalan maupun penindakan. Operasi Keamanan Laut, selama tahun 2013 telah dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui putusan pengadilan dalam bentuk denda kepada pemilik kapal yang melakukan pelanggaran. Dilaksanakan oleh Koarmabar dan Koarmatim selama 300 hari. Gelar operasi TNI Angkatan Laut Tahun 2013 didasarkan pada perkembangan lingkungan strategis serta prediksi ancaman yang ada. Jenis operasi diselaraskan dengan jenis operasi Mabes TNI yaitu dalam bentuk OMP dan OMSP. Untuk kegiatan operasi dalam rangka penegakan kedaulatan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia yang diimplementasikan dalam gelar operasi militer perang (OMP) yaitu:

- 1) Operasi Intelijen Maritim.
- 2) Operasi Pengamanan Perbatasan (RI-RDTL-Australia, RI-Philipina, RI-Vietnam, RI-Papua Nugini-Palau).
- 3) Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar.
- 4) Operasi Mallaca Strait Sea Patrol (MSSP).
- 5) Operasi Siaga Tempur Laut.

Sedangkan kegiatan operasi dalam rangka menjaga keamanan dilaksanakan serangkaian kegiatan Operasi militer selain perang (OMSP) yaitu:

- 1) Operasi Patroli terkoordinasi (Patkor Indosin, Patkor Malindo, Patkor Indindo, Patkor Optima, Patkor Philindo, Patkor Ausindo, Patkor IndoThai).
- 2) Operasi Pengamanan Obyek vital Nasional.
- 3) Operasi Pengamanan VVIP.
- 4) Operasi Perdamaian Dunia.
- 5) Operasi Bantuan Kepada Polri.
- 6) Operasi Bantuan Bencana.
- 7) Operasi SAR.
- 8) Operasi Bantuan kepada Pemerintah.
- 9) Operasi Keamanan Laut.
- 10) Operasi Pengamanan ALKI.
- 11) Operasi Gaktib dan Yustisi.
- 12) Operasi Patroli Udara Maritim EIS.
- 13) Operasi Surta TNI.
- 14) Operasi Angkutan Laut Militer.

Kegiatan OMP dan OMSP tersebut diatas telah digelar sepanjang tahun dibawah kendali Panglima TNI sebagai berikut:

- 1) Operasi Keamanan Laut, selama tahun 2013 telah dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui gelar operasi yang dilaksanakan oleh Koarmabar dan Koarmatim selama 300 hari.
- 2) Pengamanan ALKI.
 - (a) ALKI I, Dilaksanakan oleh Koarmabar selama 300 hari dan Koopsau I selama 60 hari.
 - (b) ALKI II dan III, Dilaksanakan oleh Koarmatim selama 300 hari dan Koopsau II 120 hari.
- 3) Operasi Udara.
 - (a) Operasi Pertahanan Udara Pasif dan Pertahanan Udara Terkoordinasi Malindo. Dilaksanakan oleh Kohanudnas selama 300 hari.
 - (b) Patroli Udara (Patud), Pengamatan dan Pengintaian Udara (Matud). Dilaksanakan oleh Koopsau I dan II.

Operasi-operasi yang dilaksanakan tersebut, telah mampu melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia sepanjang tahun. Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan baik itu merupakan operasi matra maupun operasi gabungan dapat disampaikan bahwa output atau Realisasi (capaian) kinerja penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Operasi Keamanan Laut, selama tahun 2013 telah dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui putusan pengadilan dalam bentuk denda kepada pemilik kapal yang melakukan pelanggaran. Dilaksanakan oleh Koarmabar dan Koarmatim selama 300 hari. Hasil dari pelaksanaan operasi di perairan yurisdiksi nasional adalah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap 2.818 kapal dengan rincian:
 - a) 1.172 kapal ikan Indonesia
 - b) 36 kapal ikan Asing
 - c) 94 kapal angkut kayu
 - d) 1.516 kapal lain

Dengan adanya pemeriksaan terhadap kapal kapal yang dicurigai yang dilaksanakan oleh unsur TNI Angkatan Laut tersebut akan memberikan daya tangkal yang cukup besar terhadap upaya-upaya untuk mengganggu kedaulatan NKRI dan melanggar hukum oleh pihak-pihak tertentu.
- 2) Pengamanan ALKI.
 - a) ALKI I. Dilaksanakan oleh Koarmabar selama 300 hari dan Koopsau I selama 60 hari. Hasil operasi memeriksa 86 kapal, diijinkan berlayar 85 kapal dan 1 kapal dalam proses hukum.
 - b) ALKI II dan III. Dilaksanakan oleh Koarmatim selama 300 hari dan Koopsau II 120 hari. Hasil operasi memeriksa 212 kapal, diijinkan berlayar 210 kapal dan 1 kapal dalam proses hukum.
- 3) Operasi Udara.
 - a) Operasi Pertahanan Udara Pasif dan Pertahanan Udara Terkoordinasi Malindo. Dilaksanakan oleh Kohanudnas selama 300 hari. Hasil evaluasi, pelaksanaan operasi belum optimal hal ini dikarenakan keterbatasan Alutsista dan menurunnya kemampuan operasional radar.
 - b) Patroli Udara (Patud), Pengamatan dan Pengintaian Udara (Matud). Dilaksanakan oleh Koopsau I dan II. Hasil operasi dapat mendeteksi dan memfoto 4.672 sasaran, dengan rincian:
 - (1) 1.338 kapal barang.
 - (2) 937 kapal tanker.
 - (3) 11 kapal nelayan.
 - (4) 17 kapal container.
 - (5) 142 kapal penumpang.
 - (6) 124 kapal tunda.
 - (7) 401 kapal other ship.

Realisasi-realisis (capaian) indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja tahun sebelumnya dapat dilaporkan meningkat, hal tersebut disebabkan selain kegiatan saat ini merupakan tahun keempat dari Renstra 2010-2014, hal yang lain adalah koordinasi dari ketiga angkatan sangat solid dan terkoordinasi dengan baik. Capaian kinerja yang berhasil memuaskan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

- 1) Operasional, tugas pokok dapat dilaksanakan sesuai program kerja.
- 2) Telah dipahaminya dan dilaksanakannya management operasi militer secara baik oleh Kotama Operasi.
- 3) Telah dilaksanakannya direktif dari Komando atas secara baik.
- 4) Terdukungnya anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.

Sedangkan capaian kinerja yang kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh:

- 1) Dari aspek operasional, hasil yang dicapai masih belum optimal hal tersebut disebabkan luas wilayah dan tanggung jawab penugasan.
- 2) Dari aspek personel, baik kuantitas maupun kualitas personel Staf Operasi di seluruh Kotamaops TNI masih kurang memahami bahasa Inggris.
- 3) Dari aspek sarana dan prasarana khususnya Alkom dan Alutsista masih sangat terbatas.
- 4) Dari aspek dukungan anggaran, dapat dinilai masih sangat terbatas dihadapkan dengan wilayah dan tanggung jawab.

Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain melalui:

- 1) Rencana penyelenggaraan operasi didasarkan atas prediksi ancaman dan lebih dititikberatkan pada daerah dan sasaran yang terpilih.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dalam tugas (*in service training*) dan mengoptimalkan pelaksanaan latihan pratugas, guna meningkatkan kualitas personel.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana secara umum terutama Alkapsus, Alkomsus dan Matsus yang bersifat personal untuk mendukung operasi yang sangat terbatas, sementara dapat di-siasati dengan mengandalkan *human intelligence*.
- 4) Mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan anggaran operasional kepada pemerintah.

e. Sasaran 5.

Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Persentase seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.	%	75	75	100



Undang-undang TNI Nonor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas dari TNI adalah OMP dan OMSP. Didalam pelaksanaan OMSP, TNI melaksanakan beberapa kegiatan operasi, salah satu operasi tersebut adalah Operasi Pengamanan Obyek Vital Nasional. Kemhan dalam mencapai sasaran kelima yaitu Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis telah melaksanakan beberapa kegiatan operasi sebagai berikut:

- 1) Pengamanan PT Exxon Mobil Oil di Kabupaten Aceh Utara, dengan:
 - a) Menempatkan pos-pos di titik rawan sebanyak 15 pos disepanjang pipa line.
 - b) Patroli terhadap jembatan ponton dan sumur gas serta patroli terhadap pipa line dan fasilitas produksi secara rutin dan insidental.
 - c) Mengadakan pengamanan bersama dengan unsur pengamanan dalam berupa jaga pos dan patroli.

- d) Melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap pejabat dan karyawan PT Exxon MOI dan pengamanan RPU.
- 2) Pengamanan PT Freeport Indonesia:
 - a) Melaksanakan pengamanan di wilayah yang menjadi sektor tanggung jawabnya.
 - b) Memberikan bantuan perkuatan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Polri.
 - 3) Pengamanan obyek vital TNI.
 - a) Pengamanan gudang pusat munisi TNI dan PT Pindad di Jawa Barat.
 - b) Pengamanan gudang pusat munisi TNI dan PT Pindad Turen di Jawa Timur.
 - c) Pengamanan gudang pusat munisi TNI di Sulsel.
 - d) Pengamanan gudang pusat senjata dan gudang pusat munisi TNI di Jakarta.
 - e) Pengamanan PT PAL dan gudang munisi TNI Batu Poron di Jawa Timur.
 - f) Pengamanan PT Dirgantara Indonesia dan PT Dahana Tasikmalaya di Bandung.
 - g) Pengamanan gudang munisi dan senjata TNI AU di Magetan Jawa Timur.
 - h) Pengamanan ruang Pusdalops TNI di Cilangkap.
 - i) Pengamanan Mabes TNI dan Kemhan di Jakarta.

Hasil dari beberapa kegiatan (*output*) pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis telah menciptakan rasa aman bagi investor maupun masyarakat disekitar objek-objek vital. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pengamanan objek vital telah tercapai. Hasil tersebut antara lain adalah:

- 1) Pelaksanaan pengamanan terhadap aset-aset PT Exxon MOI di titik-titik rawan sepanjang route dan line pipa telah memperkecil kemungkinan terjadinya sabotase, pencurian, dan tindakan anarkis lainnya sehingga berdampak positif terhadap keamanan.
- 2) Pengamanan terhadap kegiatan di areal Cluster, perkantoran dan pengamanan yang telah dilakukan bersama dengan security PT. Exxon MOI menimbulkan rasa aman bagi karyawan dan dampak rasa aman berpengaruh terhadap peningkatan kinerja produktifitas kerja dan kelancaran produksi.
- 3) Pengamanan di sekitar PT. Freeport Indonesia dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan dampak keamanan bagi PT. Freeport Indonesia.

- 4) Pelaksanaan kegiatan pengamanan obyek vital TNI telah berhasil menciptakan kondisi aman dan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Output maupun *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan/operasi yang dilaksanakan T.A 2013 dapat disimpulkan meningkat capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan T.A 2012, hal tersebut dapat terlaksana dikarenakan selain tahun 2013 merupakan tahun ke-empat dari Renstra 2010-2014, juga permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tahun 2012 dapat diminimalkan. Meningkatnya capaian kinerja tersebut terjadi disebabkan objek yang tercover lebih banyak jumlahnya dan area lebih luas. Peningkatan tersebut dapat pula dilihat dari tabel sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	2012	2013
1	2	3	4
1.	Persentase seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.	25%	75%

Capaian kinerja yang berhasil memuaskan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

- a) Operasional, tugas pokok dapat dilaksanakan sesuai program kerja.
- b) Telah dipahaminya dan dilaksanakannya management operasi pengamanan obyek vital nasional oleh Mabes TNI.
- c) Telah dilaksanakannya direktif dari Komando atas secara baik.
- d) Terdukungnya anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.

Sedangkan capaian kinerja yang kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh:

- a) Dari aspek operasional, hasil yang dicapai masih belum optimal hal tersebut disebabkan luas wilayah dan tanggung jawab penugasan.
- b) Dari aspek personel, baik kuantitas maupun kualitas personel Staf Operasi di seluruh Kotamaops TNI masih kurang memahami bahasa Inggris.
- c) Dari aspek sarana dan prasarana khususnya Alkom dan Alutsista masih sangat terbatas.
- d) Dari aspek dukungan anggaran, dapat dinilai masih sangat terbatas dihadapkan dengan wilayah dan tanggung jawab.

Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain melalui:

- a) Rencana penyelenggaraan operasi didasarkan atas prediksi ancaman dan lebih dititikberatkan pada daerah dan sasaran yang terpilih.

- b) Menyelenggarakan pendidikan dalam tugas (*in service training*) dan mengoptimalkan pelaksanaan latihan pratugas, guna meningkatkan kualitas personel.
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana secara umum terutama Alkapsus, Alkomsus dan Matsus yang bersifat personal untuk mendukung operasi yang sangat terbatas, sementara dapat disiasat dengan mengandalkan *human intelligence*.
- d) Mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan anggaran operasional kepada pemerintah.

f. Sasaran 6.

Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplemetasikan secara sinergis lintas sektor.	%	65	65	100



Dalam memenuhi sasaran yang keenam dengan Indikator Kinerja tersebut diatas, Kemhan RI melalui salah satu direktoratnya berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik agar dapat mencapai target yang sesuai direncanakan di dalam Penetapan Kinerja (PK). Direktorat tersebut adalah Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) Kemhan. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi antara lain Analisa Strategi, Perumusan Kebijakan Strategi dan Kebijakan Implementatif, Kerja Sama Internasional, Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Utama Pertahanan Negara, Perumusan Hukum Strategi Pertahanan, Pengelolaan Wilayah Pertahanan dan Koordinasi staf dalam kerangka dukungan teknis, administrasi, fasilitasi dan supervisi teknis, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melengkapi kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Kebijakan Kajian Ulang tentang *Strategi Defence Review* (SDR).
- 2) Melaksanakan Kajian Postur Pertahanan Nirmiliter.
- 3) Melaksanakan Kajian Strategi Pertahanan Nirmiliter.
- 4) Melaksanakan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial.
- 5) Melaksanakan Sosialisasi Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara (PKPN).
- 6) Melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
- 7) Melaksanakan Kajian Perumusan Kebijakan Pengamanan Objek Vital Strategi.
- 8) Melaksanakan Kajian Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter.
- 9) Melaksanakan Penyempurnaan Produk - Produk Strategis Pertahanan Negara Ditjen Strahan Kemhan.
- 10) Melaksanakan kegiatan Desk PPKP.
- 11) Melaksanakan Supervisi Perumusan tentang Kebijakan Hanneg Bidang Postur Hanneg.

Selanjutnya hasil (*output*) dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Perumusan Program Legislasi Bidang Pertahanan Tahun 2014, pencapaian sasaran 100%.
- 2) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Rahasia Negara, pencapaian sasaran 76%.
- 3) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri, pencapaian sasaran 100%.
- 4) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional, pencapaian sasaran 100%.

- 5) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Senjata Api, pencapaian sasaran 100%.
- 6) Terlaksananya Pembahasan R. Perpres tentang Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara RI - Turki, pencapaian sasaran 100%.
- 7) Terlaksananya Kajian Hukum tentang Ancaman Keamanan Nasional terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI, pencapaian sasaran 100%.
- 8) Terlaksananya *Contiuning Legal Education* (CLE) Pembentukan Perundang-undangan untuk personel Kemhan dan TNI, pencapaian sasaran 100%.
- 9) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Prajurit Wajib, pencapaian sasaran 100%.
- 10) Terlaksananya Pembahasan RUU tentang Pemasarakatan Militer, pencapaian sasaran 100%.
- 11) Terlaksananya Pengembangan Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (Sistem Aplikasi), pencapaian sasaran 100%.
- 12) Terlaksananya Pembahasan R. Perpres tentang Objek Vital, pencapaian sasaran 100%.
- 13) Terlaksananya pembahasan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, pencapaian sasaran 100%.
- 14) Terlaksananya Pembahasan R. Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI, pencapaian sasaran 100%.
- 15) Terlaksananya Penyempurnaan Produk-Produk Strategis Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan (SDR, Revisi Doktrin, Revisi Postur, Revisi Buku Putih Pertahanan Indonesia, Revisi Strategi Pertahanan Negara), pencapaian sasaran 99%.

Selain hasil yang telah didapat seperti tersebut diatas, dalam menjabarkan atau memberikan penekanan kepada kegiatan dalam sasaran keenam yaitu tentang kebijakan yang diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, maka Ditjen Strahan Kemhan melaksanakan evaluasi dan kajian tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melaksanakan Evaluasi Pengerahan Kekuatan TNI dalam Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- 2) Melaksanakan Evaluasi Peran TNI Membantu Polri dalam rangka Tugas Kamtibmas di Papua.
- 3) Melaksanakan Kajian Akademik Kawasan Terpadu Indonesia *Peace and Security Centre* (IPSC).
- 4) Melaksanakan Kajian dan Seminar Pengorganisasian Komponen Pertahanan Negara dalam mendukung Pertahanan Nir-militer.

- 5) Melaksanakan Evaluasi Pengerahan kekuatan TNI di perbatasan Darat NKRI (Kalimantan, Timor Barat dan Papua).
- 6) Melaksanakan Evaluasi Pengerahan Kekuatan TNI di Perbatasan Laut NKRI.
- 7) Melaksanakan Penyusunan dan Perumusan Keputusan/Peraturan Presiden tentang kawasan terpadu Indonesia *Peace and Security Centre* (IPSC).
- 8) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan TNI dalam Menanggulangi Bencana Alam.
- 9) Melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial di Bidang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI.

Hasil dari kajian dan evaluasi tersebut diatas maka akan didapat kelengkapan perumusan legislasi bidang pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Perumusan Program Legislasi Bidang Pertahanan Tahun 2014.
- 2) Melaksanakan Pembahasan RUU tentang Rahasia Negara.
- 3) Melaksanakan Pembahasan RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri.
- 4) Melaksanakan Pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional.
- 5) Melaksanakan pembahasan RUU tentang Senjata Api.
- 6) Melaksanakan Pembahasan R. Perpres tentang Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara RI-Turki.
- 7) Melaksanakan *Continuing Legal Education* (CLE) Pembentukan Perundang-undangan untuk personel Kemhan dan TNI.
- 8) Melaksanakan SKB antara Kemhan dan Kemlu terkait Kepres RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan di Luar Negeri.

Pembahasan dan penyusunan piranti lunak antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan secara umum dapat dilaksanakan namun kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama akibat adanya ketergantungan terhadap program legislasi nasional serta keterkaitan antar instansi. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perumusan kebijakan-kebijakan Pertahanan Negara setiap tahunnya dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.
- 2) Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, terkait dengan bidang strategi pertahanan walaupun masih terdapat beberapa kendala.

g. Sasaran 7.

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data *up-to-date* dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Persentase satuan kerja yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.	%	60	60	100



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir di setiap aspek kehidupan. Teknologi informasi tidak hanya dipakai dalam bidang industri ataupun ekonomi, tetapi juga dibidang pertahanan yang banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi juga menggeser hakekat ancaman yang datang dari negara (*state threat*) melalui penggunaan senjata pemusnah massal menjadi kelompok (*non state threat*) dengan penguasaan teknologi tinggi. Ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nir-militer seperti ancaman "*cyber crime*".

Saat ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang membangun Sistem Informasi Pertahanan Negara atau lebih dikenal lagi dengan istilah Sisfohaneg yang berbasis pada penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, *real time* sehingga aman dalam proses penetapan kebijakan keputusan. Keberadaan Sisfohaneg ini sangat penting sekali dimasa damai guna menghadapi perang informasi seperti saat ini. Adapun prioritas pengembangan Sisfohaneg dibagi dalam 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

- 1) Sistem Jaringan Komunikasi Data. Gelar jaringan komunikasi data hingga tahun 2014 nanti mencakup seluruh bidang di lingkungan kerja Kemhan dan instansi pemerintahan lainnya yang relatif berada dalam letak geografis yang berdekatan hingga pos-pos daerah perbatasan negara. Diharapkan dengan terbangun jaringan komunikasi data ini maka akan terjadi percepatan arus informasi secara dua arah (*two ways*)
- 2) Sistem Aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi Sisfohaneg menitikberatkan pada aplikasi yang dapat menghasilkan laporan cepat dan tepat dalam bentuk grafik dan matriks disajikan dalam digital *dashboard* untuk memudahkan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu dikembangkan pula sistem informasi geografis atau lebih dikenal dengan nama *Geographic Information System (GIS)* yang saat ini telah mencakup 3 (tiga) satker yaitu Strahan (Pos Pamtas, ALKI, Pulau Terluar, Garis Perbatasan); Pothan (Batas Kodam, Batas Korem, Batas Kodim) dan Kuathan (Gelar pasukan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU).
- 3) Updating Data *On Line*. Bagian yang terpenting dari suatu sistem informasi adalah ketersediaan data. Data tersebut harus disajikan secara cepat dan akurat serta terintegrasi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi penting untuk proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Data yang diolah bukan hanya data terstruktur saja namun juga data tak struktur. Adapun jenis data meliputi data Renhan (APBN), Strahan (daerah perbatasan, pos Pamtas, pulau terluar hingga kesiapan tempur), Kuathan (personel TNI dan PNS, alutsista hingga Pangkalan TNI-AL & Sipil), Pothan (Produksi Pangan & Palawija, Rumkit Sipil, Personel Medis Paramedis Sipil, hingga stasiun radio dan TV), Ranahan (Industri Pertahanan, Kontrak Pengadaan Alutsista KE/Non KE, Kelaikan Materil & Kelaikan Instruktur, Materil Kontrak & Negara Supplier, BTB & Sertifikat Tanah) dan yang terakhir data geografis Strahan yang meliputi Peta topografi, Peta Terrain/Citra Satelit, Pulau Terluar, Perbatasan.
- 4) Sistem Keamanan Data/Sandi. Saat ini ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nir-militer seperti ancaman *cyber crime*. Karena itu, sistem keamanan pada sistem informasi negara sangat diperlukan. Hal tersebut pula yang menjadi dasar untuk membangun isfohaneg yang aman dari gangguan-gangguan dalam dan

luar. Dan salah satu fokus pembangunan Sisfohaneg adalah sistem keamanan data. Selain perangkat keras dan lunak dibutuhkan juga tenaga-tenaga Teknologi Informasi (TI) terdidik yang mampu mendeteksi secara cepat ancaman/gangguan terhadap Sisfohaneg.

- 5) Pembinaan SDM TIK. Dengan adanya implementasi Sisfohaneg maka sebagai konsekuensinya akan merubah cara kerja organisasi saat ini memerlukan SDM yang handal, untuk mengoperasionalkan teknologi yang cukup canggih. Dibutuhkan transfer pengetahuan (transfer knowledge) dari pengembang sistem atau pemasok teknologi kepada SDM yang telah disiapkan sebelumnya secara kontinyu dan berkesinambungan. Hal ini untuk menjamin kemampuan SDM yang siap terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini. Pembinaan SDM menjadi bagian integral dari pembangunan Sisfohaneg.

Apabila 5 (lima) prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang direncanakan maka diharapkan sistem informasi pertahanan negara yang aman dapat terbentuk. Kemajuan TI berimplikasi pada pergeseran paradigma memenangkan perang. Pada awalnya, cukup dengan konsep Komando dan Kendali (Kodal/K2), yang pada prinsipnya merupakan hubungan intern antara komandan dengan anak buahnya dalam tugas operasi. Namun kemudian komunikasi dengan satuan lain dalam suatu operasi menjadi keharusan sehingga lahir konsep baru yaitu Komando, Kendali dan Komunikasi (K3). Dengan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir, maka ditambahkan keterangan atau data intelijen (K3I). Informasi yang akurat dan strategis memang menjadi faktor yang sangat menentukan bagi kekuatan pertahanan suatu negara. Sebab informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komando dan kendali yang merupakan kunci setiap operasi. Informasi menjadi dasar pembuatan kebijakan atau untuk menyusun strategi dalam menghadapi ancaman yang ada. Taktik brilian untuk menggempur lawan tidak akan terlahir tanpa adanya informasi yang lengkap, akurat, dan cepat. Disini sudah jelas bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kemhan dalam menerapkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara. telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja yang direncanakan.

h. Sasaran 8.

Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara mata laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akuntabel.	%	78	78	100



Globalisasi dengan segala implikasinya telah membawa dampak sangat luar biasa terhadap dinamika politik dan keamanan internasional saat ini. Salah satu dimensi yang menonjol dari globalisasi, yaitu fenomena kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan terbukti memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia dan interaksi antar negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan yang lebih kompleks dan multi dimensional, yang tidak hanya mencakup dimensi militer semata, melainkan juga dimensi yang bersifat non-militer.

Kemhan dan TNI dalam menyikapi dampak yang timbul seperti yang diuraikan diatas, telah menyiapkan beberapa sistem aplikasi informasi yang dapat membantu dalam penyelesaian tugas yang diembannya. Di lingkungan TNI AL kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan beberapa program, website, pembangunan sistem, perbaikan jaringan dan aplikasi di beberapa satker jajaran TNI Angkatan Laut. Hasil yang dicapai adalah tersedianya:

- 1) Sistem Infolakta Koarmabar.
- 2) Sistem informasi Diswatpersal.
- 3) Hardware sistem informasi operasional pendidikan Disdikal.
- 4) Sistem pengamanan Disinfoalhtal.
- 5) Program E-Library di perpustakaan Disdikal, AAL dan Kobangdikal.
- 6) Aplikasi dan peralatan/perlengkapan Server Video Management System Puskodal.
- 7) Sistem informasi Spamal.
- 8) Sistem informasi personel terintegrasi Spersal.

Selain dari TNI AL, seluruh jajaran di Kemhan dan TNI juga menyiapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, salah satunya adalah Satkomlek TNI. Satkomlek TNI dituntut kehadirannya di mandala operasi bahkan terkadang harus mendahului pasukan induk untuk menggelar alat komunikasinya. Selain menggelar alat komunikasinya, tugas lain yang diemban adalah mengamankan sistem komunikasi yang telah digelar maupun terhadap informasi dan transformasi yang sering dan terpaksa harus mempergunakan alat khusus dan gelar alat komunikasi yang sifatnya *jamming* dan *anti jamming*.

Begitu pula dalam misi perdamaian PBB di Libanon dan Kongo, personel dan peralatan Satkomlek TNI juga dikirim ke negara yang dilanda perang tersebut. Didalam tugasnya Satkomlek menggelar Radio Single Side Band (SSB) yang bisa menghubungkan secara langsung pasukan TNI yang sedang bertugas di Libanon maupun di Kongo dengan Mabes TNI. Mereka juga dibekali IMARSAT sebagai sarana telepon email dengan menggunakan satelit yang juga dapat dijadikan sarana komunikasi untuk berhubungan dengan siaga yang ada di Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Mabes TNI.

Hal lain adalah kegiatan dalam mengamankan Selat Malaka, disini dibutuhkan kerja sama yang solid dari ketiga angkatan karena banyak kegiatan/sarana yang diperlukan dari masing-masing matra tersebut.

Dalam pengamanan Selat Malaka ini, TNI bekerja sama dengan pemerintahan Singapura yaitu dalam hal penggunaan Radar SINGTEK dipermukaan laut. Sedangkan TNI menginstalasi satu titik VSAT dan perangkat lain di Batam. TNI juga menugaskan Sub Denkom Strada yang berada di Tanjung Pinang sebagai Ruang Pusat Komando Pengendali agar Puskodal Guskamlabar yang berada di Batam dapat berkomunikasi dengan Mabes TNI yang dilengkapi dengan VSAT serta Radio Monitoring

dan Observasi (MONOB) yang sudah dipasang di Lanal Batam, dan diintegrasikan dengan Siskom yang ada di Lanal hasil kerja sama dengan Singapura, dengan bantuan Radar SURPIC (Surveillance Picture) dan sudah digelar di Lanal Batam.

Dari data-data yang telah disampaikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke 8 (delapan) yaitu seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dgn administrasi yang akuntabel sesuai SOP, dengan indikator kinerja persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akuntabel, **dapat tercapai** sesuai target yang ditetapkan.

i. Sasaran 9.

Seluruh satuan kerja Kemhan/TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kopetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase satuan kerja UO Kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	%	80	80	100
2.	Persentase satuan-satuan kerja TNI yang memiliki personel sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam TOP/DSPP.	%	22	22	100



Pada sasaran yang ke Sembilan yaitu seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin., dimana indikator kinerja adalah seperti tersebut diatas, Kemhan dan TNI telah melaksanakan penataan organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka menjabarkan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai dengan konsep pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan. Untuk mendukung pencapaian sasaran khususnya sasaran yang kesembilan maka upaya yang dilakukan oleh Kemhan adalah melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dengan baik dan juga melaksanakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI, hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut saat ini Kemhan dan TNI telah mempunyai aturan atau daftar susunan personel, dimana daftar susunan personel itu diharuskan mempunyai klasifikasi jabatan dan kualifikasi pendidikan, yang sebelumnya diwajibkan seluruh personel harus melewati pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.

Pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi tersebut berupa diklat-diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. sehingga nantinya lebih tepat apabila akan menempatkan personel sesuai profesinya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pegawai/personel sesuai kualifikasi dan kompetensi yaitu dengan melaksanakan pendidikan dan latihan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Dalam Negeri.
 - a) Terselenggaranya peningkatan kualitas SDM melalui Penataran dan Pelatihan integratif di Dalam Negeri, yang diselenggarakan oleh Satker dilingkungan Kemhan dan TNI.
 - b) Terselenggaranya peningkatan kualitas personel Kemhan dan TNI dan PNS melalui pemberian bantuan beasiswa untuk strata S-1 dan S-2 serta bantuan beasiswa tersebar untuk strata S-1, S-2 dan S-3 bagi Perwira TNI dan PNS TNI Gol III ke atas yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta terakreditasi "A".
- 2) Pendidikan Luar Negeri. Terselenggaranya peningkatan kualitas personel Kemhan dan TNI melalui Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum), Pendidikan Pengembangan Personel (Dikbangpers), Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikiptek). Begitu juga dengan pelaksanaan seminar, konferensi maupun kunjungan studi banding di luar negeri yang ditawarkan oleh negara sponsor sesuai kepentingan organisasi.

Hasil pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran yang diharapkan. Pencapaian sasaran kekuatan personel Kementerian Pertahanan tersebut sampai dengan TA. 2013 per 31 Desember 2013 sebanyak 659 orang 3.840 orang (TNI+PNS) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Daftar Susunan Personel (DSP) Eselon I s.d. IV sebanyak 733 orang (TNI + PNS) sebagai berikut:

No.	Uraian	DSP	Posisi Awal TA. 2013	Jumlah S.D. 31-12-2013	% Pencapaian Sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	Eselon I	15	15	14	93,33%
2.	Eselon II	52	50	50	96,15%
3.	Eselon III	174	162	169	97,13%
4.	Eselon IV	492	457	426	86,59%
	JUMLAH	733	684	659	89,91%

- 2) Daftar Susunan Personel (DSP) Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum berjumlah 3.725 orang (TNI + PNS) sebagai berikut:

No.	Uraian	DSP	Posisi Awal TA. 2013	Jumlah S.D. 31-12-2013	% Pencapaian Sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	Setingkat ES III				
	Jab Fung Umum	139	112	138	99%
	Jab Fung Tertentu	70	51	76	109%
2.	Setingkat ES IV				
	Jab Fung Umum	79	44	72	91%
	Jab Fung Tertentu	82	44	81	99%
3.	Gol. III				
	Jab Fung Umum	1.827	1.609	1.350	74%
	Jab Fung Tertentu	133	44	58	44%
4.	Gol. II				
	Jab Fung Umum	1.343	1.004	601	45%
	Jab Fung Tertentu	52	48	187	360%
5.	Gol. I				
	Jab Fung Umum	0	54	35	0
	JUMLAH	3.725	3.020	2.598	70%

Selain pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, Kemhan juga melaksanakan berbagai latihan yang rutin dan berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme TNI sebagai berikut:

- 1) Latihan Kesiapsiagaan Operasi, latihan dan kesiapsiagaan bertujuan untuk memelihara tingkat kesiapsiagaan dan menguji RO Kotama Operasi TNI yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unsur angkatan dalam upaya deteksi dini, cegah dini dan penindakan terhadap ancaman potensial di wilayah Kotama Operasi TNI.
- 2) Latgab. Dilaksanakan guna memelihara sinergi kemampuan dua angkatan atau lebih dalam strategi, taktik dan teknik. Diselenggarakan untuk kepentingan latihan penggunaan kekuatan di wilayah yuridiksi nasional yang diprediksi mempunyai potensi ancaman dari dalam dan luar negeri.
- 3) Latihan Bersama dengan Negara Sahabat, merupakan pilar hubungan baik bilateral maupun Multilateral dengan negara-negara sahabat dan sebagai sarana mempererat kepercayaan antar negara pada umumnya dan khususnya antar Angkatan Bersenjata.
- 4) Latihan Pratugas Operasi. Pelaksanaan latihan pratugas operasi bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan khusus untuk pelaksanaan tugas operasi baik operasi pamrahwan, pam pulau terluar, pam perbatasan, pam obyek vital dan pam VVIP serta operasi perdamaian dunia.

Dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan, maka Kemhan dan TNI telah menghasilkan personel yang mampu melaksanakan tugas pokok khususnya dalam melaksanakan tugas operasi. Selanjutnya dalam rangka mencapai sasaran yang terakhir (sasaran 9) yaitu kesejahteraan yang terjamin, maka Kemhan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perawatan personel sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Jasmani Personel
- 2) Perawatan kesehatan personel.
- 3) Pemberian biaya perawatan jenazah dan deputasi pemakaman.
- 4) Pemberian gaji dan tunjangan.
- 5) Pemberian tunjangan kinerja.
- 6) Pemberian uang makan PNS.
- 7) Pemberian tanda kehormatan personel di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 8) Pemberian penyuluhan tentang pembinaan mental personel di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dari data-data yang telah disampaikan tersebut diatas, baik pelaksanaan kegiatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sehingga menghasilkan personel yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan Kemhan yang menjamin terlaksananya kesejahteraan personel maka capaian kinerja yang diharapkan **telah tercapai**.

j. **Sasaran 10**

Pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang professional.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan.	%	80	80	100



Proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, langkah dan tahapannya telah terfokus dengan jelas yang disertai garis besar “*Grand Strategi*”-nya. Tugas lanjutan yang harus dipikirkan bersama adalah bagaimana mengimplementasikan Visi, Misi dan Grand Strategy-nya secara rinci kedalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan evaluasi terhadap capaian yang menjadi sasaran secara terukur dan selalu dimutakhirkan atau diperbarui (di *up to date* - kan), termasuk di bidang Pendidikan bagi pegawai/personel.

Kemhan dalam menjawab tentang tugas lanjutan apa yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Visi, Misi dan Grand Strategy khususnya di bidang pendidikan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi pertahanan dengan nama Universitas Pertahanan Indonesia disingkat Unhan. Unhan adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi serta pendidikan profesi dibidang pertahanan dan bela negara, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tri Dharma perguruan tinggi, untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia (*world class*).

Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Universitas Pertahanan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Penyelenggaraan program studi di lingkungan UNHAN merujuk kepada Keputusan Mendiknas RI Nomor: 196/E/O/2011 TGL 7 September 2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi pada Universitas Pertahanan Indonesia di Jakarta.

Unhan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang unik karena mengkhususkan diri pada studi pertahanan setingkat Strata 2. Unhan adalah lembaga pendidikan tinggi terbuka. Unhan memberi kesempatan kepada para perwira TNI dan sipil untuk belajar dan memperdalam Ilmu Pertahanan dari sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada awalnya kegiatannya Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) memiliki dua Fakultas atau Sekolah Pasca sarjana dengan lima Program Studi, yaitu:

- 1) Sekolah Pasca sarjana Strategi Pertahanan:
 - Program Studi Magister Strategi Perang Semesta (*Total War Strategy*).

- 2) Sekolah Pascasarjana Manajemen Pertahanan.
 - a) Program Studi Magister Manajemen Pertahanan (*Defense Management*).
 - b) Program Studi Magister Ekonomi Pertahanan (*Economic Defense*).
 - c) Program Studi Magister Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional (*Disaster Management for National Security*).
 - d) Program Studi Magister Keamanan Maritim (*Maritime Security*).

Dalam perkembangannya UNHAN selaku perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan terkait dengan kajian-kajian pertahanan dan keamanan nasional memandang perlu untuk membuka program studi baru yaitu:

- 1) Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (*Peace and Conflict Resolution*).
- 2) Program Studi Magister Ketahanan Energi Untuk Keamanan Nasional (*Energy Security for National Security*).
- 3) Program Studi Magister Peperangan Asimetrik (*Asymmetric Warfare*).

Penambahan tiga Prodi tersebut menjadikan saat ini Unhan memiliki tiga sekolah dan tujuh program studi. Tiga sekolah tersebut adalah Sekolah Pasca sarjana Strategi Pertahanan, Sekolah Pasca sarjana Manajemen Pertahanan dan Sekolah Pasca sarjana Studi Keamanan. Untuk Tahun akademik 2012/2013 Unhan telah mewisuda 34 orang Mahasiswa Pasca sarjana. Ke 34 orang mahasiswa terdiri dari 29 orang dari Fakultas Strategi Pertahanan dan 5 orang dari Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan. Dari 34 orang tersebut terdiri dari atas 21 orang anggota TNI, 1 orang PNS, 11 orang masyarakat umum dan 1 orang mahasiswa dari Australia.

Dengan telah terselenggaranya pendidikan tinggi pertahanan maka sasaran ke 10 (sepuluh) dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan **telah tercapai capaian kinerjanya.**

k. Sasaran 11.

Sistem persenjataan dengan menerapkan teknologi mutakhir dan mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.

No.	Indiator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase produk Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan pinak industri pertahanan	%	30	30	100



Untuk mewujudkan target sasaran ke 11 (sebelas) yang telah ditetapkan, dengan indikator kinerja persentase produk alutsista industri dalam negeri dan pengembangan Pinak industri pertahanan maka Kemhan RI harus selalu

mendukung kemandirian intelektual dalam industri strategis pertahanan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kemampuan yang telah dicapai oleh 10 (sepuluh) industri strategis pertahanan, yaitu :

- 1) PT. PAL telah mampu memproduksi kapal dan power plant.
- 2) PT. Dirgantara Indonesia mampu membuat Helikopter, Pesawat angkut ringan berteknologi tinggi.
- 3) PT. PINDAD mampu membuat kendaraan taktis, kendaraan tempur, senjata dan amonisi.
- 4) PT. LEN Industri, memproduksi komponen elektronika dan peralatan elektronika yang dikembangkan menjadi Sistem Persenjataan, Radar Suveillance, Mini Combat Management Syatem (MCMS), Multifunction Operation Console (MOC).
- 5) PT. INTI memproduksi Video Surveillance System, Digital TV System.
- 6) PT. Dahana memproduksi bahan peledak (militer dan sipil)
- 7) PT. Krakatau Steel memproduksi baja KSW 500 (tahan peluru), Hot/Cold Rolled Coil, Wire Road.
- 8) PT. INKA memproduksi gerbong penumpang dan barang.
- 9) PT. Bharata Indonesia memproduksi Bomb Basket, Sharp Bomb F-16.
- 10) PT. Boma Bisma Indra memproduksi Peralatan Tenaga Listrik, Peralatan Pabrik Semen, Gula, Amonia.

Kemampuan-kemampuan yang telah dihasilkan oleh masing-masing industri tersebut merupakan kemampuan potensial yang harus dapat dikelola dengan baik. Dalam Pertahanan negara, salah satu aspek yang menentukan adalah aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada umumnya Alutsista sarat akan teknologi. Untuk mencapai kemajuan dalam membangun sarana pertahanan perlu adanya penguasaan teknologi sesuai tingkat perkembangan teknologi pertahanan saat ini. Upaya untuk meningkatkan industri strategis tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Dengan terwujudnya peningkatan industri strategis pertahanan diharapkan terjadi perubahan-perubahan baik kebijakan, kemitraan dan kolaborasi antara industri pertahanan, lembaga-lembaga Iptek, sehingga pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan Alutsista TNI, lepas dari ketergantungan dengan negara produsen.

Setiap Industri pertahanan memiliki spesialisasi produk yang berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan litbang yang lebih fokus untuk melaksanakan fungsi sesuai bidang produknya masing-masing, disamping itu untuk litbang yang diperlukan pada bagian-bagian produk yang akan diintegrasikan,

dengan melibatkan lembaga litbang, perguruan tinggi, para akademis, para professional dan Kemhan/TNI selaku konsumen, diharapkan dapat menghasilkan suatu rancang bangun sarana pertahanan yang merupakan produk terintegrasi, tidak berdiri sendiri terutama pada system persenjataan terpadu yang dikenal dengan IWS (*Integrated Weapon System*).

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 30% dengan indikator kinerja persentase produk Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan Pinak Industri pertahanan telah tercapai, hal tersebut dapat diketahui dari hasil produksi yang telah dihasilkan oleh masing-masing industri dalam negeri. Perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu dalam hal produk alutsista industri dalam negeri dapat dikatakan meningkat, hal tersebut disebabkan selama ini pengadaan Alutsista untuk memenuhi MEF TNI sebagian besar saat ini masih bergantung dari produksi luar negeri demikian pula bahan baku industri pertahanan nasional masih tergantung kepada negara lain. Sehingga langkah yang diambil oleh Kemhan dan TNI dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan MEF dilaksanakan pengadaan Alutsista dengan mengutamakan industri pertahanan nasional, sementara yang belum dapat dilaksanakan didalam negeri menggunakan produksi luar negeri. Begitu juga dalam rangka untuk memenuhi bahan baku industri pertahanan nasional antara lain dengan selalu meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP).

I. Sasaran 12.

Sarana prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan <i>prototype</i> .	%	40	40	100



Agar target capaian kinerja pada sasaran ke 12 (dua belas) dengan indikator kinerja tersebut di atas dapat tercapai maka Kemhan RI melalui salah satu Satkernya yaitu Balitbang Kemhan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan dan menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain : Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan, Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertahanan yang berkaitan dengan strategi, sumber daya pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat peralatan pertahanan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; serta Pelaksanaan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Balitbang Kemhan mempunyai kebijakan-kebijakan pada tahun anggaran 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengembangan strategi dan sistem pertahanan serta pengerahan segenap sumber daya nasional guna terciptanya kestabilan nasional.
- 2) Menciptakan dan membangun sistem pengamanan dan pengamatan sumber daya nasional.
- 3) Menciptakan dan membangun sistem Iptek Pertahanan.
- 4) Mewujudkan tingkat kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan melalui optimalisasi industri nasional.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut maka dilaksanakanlah beberapa Penelitian dan Pengembangan disegala bidang agar apa yang telah direncanakan dapat terwujud, kegiatan Litbang tersebut antara lain:

- 1) Litbang Alpalhan. Terwujudnya model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan lptek dan mampu dikembangkan secara mandiri. Hal tersebut diaktualisasikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembuatan Prototipe Roket Jarak 100 Km Ground to Ground (Tahap Awal).
 - b) Pengembangan Sistem Komunikasi dan Radar serta Instalasi Senjata pada Combat Boat 16 m.
 - c) Pembuatan Prototipe Smart Bomb Practice.
 - d) Pembuatan Prototipe Teropong Bidik Senapan Malam (TBSM).
 - e) Pembuatan Prototipe Autonomous PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak).
 - f) Pengembangan Roket R-Han 122 mm dengan jangkauan > 25 Km.
 - g) Pembuatan Prototipe Coating Anti Radar.
 - h) Penyempurnaan Prototipe Manpack VHF/AM Ground to Air (GTA) Spekmil.

- 2) Litbang Iptekhan. Tersusun dan terwujudnya rekomendasi tentang inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan lptek serta mampu dijadikan prototipe. Hal tersebut diaktualisasikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a) Fasa Pra Engineering Manufacturing Development (EMD) Program Pesawat Tempur KF-X/IF-X.
 - b) Pengembangan Roket R-Han 122 B.
 - c) Pengembangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung.

Analisis dan Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Program dan Kebijakan yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan analisis terhadap data/dokumen administrasi yang diperlukan untuk menilai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan dihadapkan pada sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Analisis dan evaluasi tersebut sangat berkaitan dengan data-data yang menunjukkan standar atau kriteria adanya keberhasilan, kemajuan fisik, kegagalan, hambatan dan cara mengatasi terkait dengan pelaksanaan program sampai tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan.
 - a) Secara umum kegiatan penelitian dan pengembangan TA. 2013 telah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.
 - b) Kegiatan pembuatan prototipe telah dilakukan uji coba sesuai dengan spesifikasi teknik yang diinginkan. Dari sejumlah kegiatan Litbang materiil yang sudah dilaksanakan masih terdapat 5 (lima) kegiatan yang mengalami lintas tahun karena prototipe yang dihasilkan tersebut belum dilakukan uji coba atau uji dinamis yaitu prototipe Roket Jarak 100 km Ground to Ground (tahap awal), Pengembangan Roket R-Han 122B, Pengembangan PTTA Wulung, dan Test/Uji coba berlayar Combat Boat 16 meter.
 - c) Kegiatan pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X juga mengalami lintas tahun dan akan diselesaikan pada akhir triwulan II Tahun 2014, sedangkan sebagian kecil atau kegiatan Radar akan diselesaikan pada tahun 2015.
- 2) Kegagalan. NIHIL

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Balitbang Kemhan sampai dengan akhir TA. 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, baik bersifat administratif maupun bersifat fisik. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sudah mencapai sasaran sebesar 100% yaitu berupa naskah Litbang, pembuatan design, model dan atau prototipe, sedangkan untuk pembuatan prototipe sebagian sudah dilaksanakan uji coba di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran ke 12 (duabelas) dengan indikator kinerja rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta mampu dijadikan prototype dapat tercapai.

j. Sasaran 13.

Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase komponen masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjadi relawan ketika terdapat indikasi terganggunya kedaulatan Negara.	%	85	85	100
2.	Persentase komponen pendukung yang dipetakan dan dibina secara terintegrasi dengan data yang <i>up to date</i> , akurat dan siap digunakan.	%	40	40	100



Dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai bela Negara di lingkungan masyarakat khususnya daerah perbatasan, Kemhan melalui Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di beberapa wilayah termasuk wilayah perbatasan. Fokus dari kegiatan tersebut adalah penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara disusun melalui pemberdayaan segenap potensi dan komponen sumber daya nasional untuk ditransformasikan, menjadi kekuatan pertahanan negara yang disiapkan sejak dini dan dilakukan untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional dibidang pertahanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain rangkaian kegiatan ibadah dan ceramah dan lain-lain yang dapat mewujudkan kesadaran bela negara dikalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang berada diwilayah perbatasan, dalam rangka menumbuhkan semangat, tekad dan sikap serta perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta semangat rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN):
 - a) Melaksanakan Sosialisasi bela negara bagi Tomas, Todat dan Togadi Papua Barat.
 - b) Melaksanakan Pembuatan Buku Implementasi Bela Negara.
 - c) Melaksanakan Pembinaan dosen kewarganegaraan melalui penguatan kompetensi dosen kewarganegaraan di Jakarta.
 - d) Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara terpusat.
 - e) Melaksanakan Tot kesadaran bela negara bagi guru – guru dilingkungan ponpes di wilayah Surakarta Jateng
 - f) Melaksanakan dukungan penyelenggaraan dialog kebangsaan tahun 2013 perintis kemerdekaan RI Yoserma Trikora Propinsi Papua
 - g) Melaksanakan bimnis KBN bagi guru PKN di Prov. Sulawesi Utara.
 - h) Melaksanakan Bimnis KBN bagi Manajemen/Karyawan Perusahaan PMDN/PMDA di Riau.
 - i) Melaksanakan Bimnis KBN bagi Aparat dan Birokrat di Sulawesi Selatan (Makasar)

- 2) Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan:
 - a) Melaksanakan Sosialisasi Komponen Cadangan dalam Sishanta Melalui Media Cetak
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Komponen Cadangan kepada PNS Kemhan, Mabes TNI/Angkatan, Kementerian, Pegawai BUMN dan Swasta
 - c) Melaksanakan membangun opini publik tentang Komponen Cadangan melalui media *website*
 - d) Melaksanakan *Talkshow* tentang Komponen Cadangan dalam Sishanta di media televisi
 - e) Melaksanakan Forum tatap muka tentang RUU Komponen Cadangan dengan Pimpinan Ormas, Pemred dan Komnas Ham.

- f) Melaksanakan Sosialisasi Komponen Cadangan di lingkungan akademisi.
 - g) Melaksanakan Kajian Pendayagunaan SDAB sebagai Komponen Cadangan Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara.
 - i) Melaksanakan Penyusunan Naskah Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Komponen cadangan.
- 3) Kegiatan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung :
- a) Melaksanakan Kajian tentang warga negara lainnya untuk Komduk Pertahanan Negara.
 - b) Melaksanakan Penyusunan Draft Pedoman tentang Pemberdayaan perempuan untuk Komduk Pertahanan Negara.
 - c) Melaksanakan Kajian tentang Penataan Tenaga Ahli/Profesi untuk Komduk Pertahanan Negara.
 - d) Melaksanakan Sosialisasi Komduk Pertahanan Negara
 - e) Melaksanakan Dialog Interaktif tentang Komduk
 - f) Melaksanakan *Grand Cyber Defence* Seminar/FGD tentang standarisasi Keamanan Informasi (optimalisasi)
 - g) Melaksanakan *Grand Cyber Defence Studi* banding ke AS dan Korsel.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) bekerja sama dengan aparat terkait didaerah baik itu dari unsur Pemda maupun dari TNI AD, AL dan AU yang sesuai dengan strata kepemimpinan (Kodam, Armabar/tim, Koopsau, Lantamal, Korem, Kodim, Lanal, Lanud) saling membantu dengan harapan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Disamping itu Kemhan dan TNI juga melaksanakan kegiatan lain yang melalui salah satu Direktoratya yaitu Ditjen Pothan Kemhan (Potensi Pertahanan) dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer sebagai berikut :

- 1) Membangun opini positif komcad dalam sishanta melalui *image building operation* dan melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta masyarakat dalam membangun sistem pembentukan komponen cadangan.
- 2) Melaksanakan kerjasama lintas sektoral mewujudkan transformasi Sumber Daya Nasional dan sarana prasaran nasional untuk komponen pendukung dalam rangka pembangunan pertahanan nir militer, termasuk *cyber defence*.

- 3) Meningkatkan Kesadaran Bela Negara secara terpadu dan lintas sektoral dengan elemen masyarakat terkait untuk memantapkan upaya *Nation Character Building*.
- 4) Meningkatkan sinergi kelembagaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

Hasil dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut, dimaksudkan untuk pemberdayaan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sasaran pendidikan bela negara dan pelatihan dasar kemiliteran dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan pemahaman terhadap Ideologi negara.

n. Sasaran 14.

Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.	%	65	65	100



Komandan Korongon Garuda TNI Melakukan Paqali Udana di Ubonen



Persiapan Sebelum Tugas (Paqali) Batalyon Komposisi TNI Korongon Garuda (Kongka XXXIV-B/UNAMID (Unitas Nations Mission in Darfur) Sudan



Forces Commander Serkan Madali Kepala Pasukan TNI Korongon Garuda (Kongka XXXIV-C/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti)



A group of soldiers in camouflage uniforms and blue berets standing in formation outdoors, possibly during a briefing or preparation.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional serta lokal telah mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara diberbagai kawasan belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa salah satu tugas TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang salah satunya ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan international. Selanjutnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI lebih mempertegas lagi dimana disebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Tentunya pelaksanaan dari penugasan tersebut selalu dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia serta ketentuan yang berlaku dalam hukum nasional maupun internasional.

Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Peran serta Indonesia selama ini dalam pengiriman Kontingen Garuda dalam operasi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan regional dan internasional semakin membangun kepercayaan dunia tentang peran penting dan kinerja Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat international dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia menganggap penting tugas-tugas pemeliharaan perdamaian diberbagai belahan dunia. Dimanapun kontingen Indonesia mengemban tugas, dunia menilai bahwa Indonesia selalu memiliki prestasi yang baik. Tentunya penilaian ini wajib dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Tugas-tugas yang telah dilaksanakan adalah antara lain:

- 1) Pada saat situasi di Libanon sangat mencekam karena perang terus berkecamuk dan belum ada tanda-tanda untuk bisa dihentikan, Indonesia aktif berdiplomasi menyerukan gencatan senjata yang kemudian disusul dengan pergelaran *peace keeping mission* di perbatasan Libanon – Israel.
- 2) Indonesia aktif berdiplomasi di PBB dan negara-negara OKI, aktif berkomunikasi ke Libanon dan Israel melalui pihak ketiga dan menyakinkan bahwa Indonesia sangat siap untuk menggelar pasukan perdamaian di Libanon dalam situasi seperti itu.

Untuk mempertahankan prestasi yang telah didapat tersebut bahkan untuk meningkatkan maka Indonesia telah membentuk suatu Institusi yang berskala internasional yaitu Indonesia *Peace And Security Center* (IPSC) atau pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (PPKI) yang dapat mensinergikan unsur-unsur terkait, sehingga dapat digunakan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dalam kerangka menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman aktual maupun potensial serta tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dunia. IPCC tersebut terdiri dari 7 (tujuh)

Institusi dan mempunyai fungsi untuk menyiapkan satuan, personel, peralatan dan kemampuan dari berbagai unsur baik TNI, Polri, PNS dan unsur masyarakat lainnya yang akan ditugaskan dalam berbagai kegiatan untuk misi pemeliharaan perdamaian dunia, penanggulangan bencana dan aksi terorisme serta tugas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain telah melaksanakan kegiatan sebagai misi pemeliharaan perdamaian dunia, untuk mencapai sasaran ke 14 (empat belas) yang telah ditetapkan dengan indikator yang ada yaitu keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional maka Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan lainnya, antara lain;

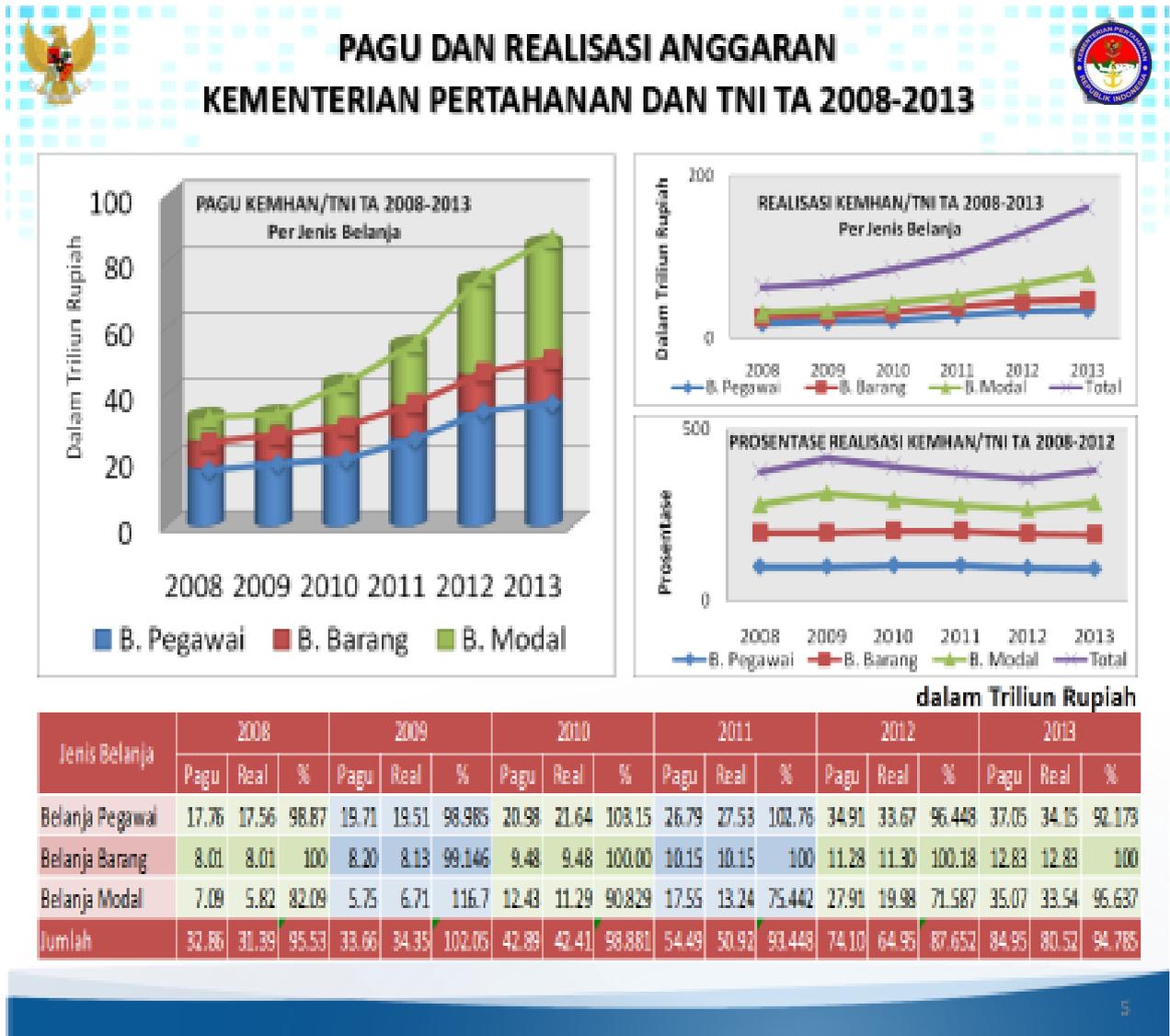
- 1) Melaksanakan *ADMM Plus EWG on CT TA. 2013* di Jakarta.
- 2) Melaksanakan *Joint Defence Security Cooperation Committee e (JDSCC)RI - Brunei Darussalam* di Brunei Darussalam.
- 3) Melaksanakan *ADSOM WG dan ADSOM Plus WG* setingkat Dirjen di Brunei Darussalam.
- 4) Melaksanakan kegiatan *Indonesia United State Security Dialogue (IUSSD)* di Indonesia.
- 5) Melaksanakan *Military to Military RI - Jepang* di Jakarta.
- 6) Melaksanakan *Indonesia - Germany Defence Dialogue di Indonesia*.
- 7) Melaksanakan *Expert Working Group (EWG) on Maritim Security* di Australia dan Malaysia.
- 8) Melaksanakan *Expert Working Group (EWG) on Peace Keeping Operation (PKO) TA. 2013* di New Zealand.
- 9) Melaksanakan *Two Plus Two RI - Australia* di Jakarta.
- 10) Melaksanakan *Bilateral Dialogue RI - Perancis (IFDD)* di Indonesia.
- 11) Melaksanakan *Midterm JCM - AS* di Amerika Serikat.
- 12) Melaksanakan *Expert Working Group (EWG) on Maritime Security TTx* di Australia.
- 13) Melaksanakan *Expert Working Group (EWG) on Maritime Security FTX* di Malaysia.
- 14) Melaksanakan *Joint Defence Committee Meeting (JDCM) RI - India* di India.
- 15) Melaksanakan *Bilateral Discussion RI - China* di Indonesia.

Dari data-data yang telah disampaikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke 14 (empat belas) yaitu Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional. dengan indikator Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional. , **dapat tercapai** sesuai target yang ditetapkan.

10. **Akuntabilitas Keuangan.** Tahun Anggaran 2013 merupakan tahun keempat Renstra Kemhan Tahun 2010 – 2014. Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI TA 2013 sebesar Rp. 84.946.392.087.000,- dan disalurkan ke KPPN (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 37.045.556.539.000,- sisanya yang dikelola Kemhan dan TNI sebesar Rp.47.900.835.548.000,-

Adapun rincian anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2013 sebesar Rp.47.900.835.548.000,- dengan alokasi per Unit Organisasi sebagai berikut:

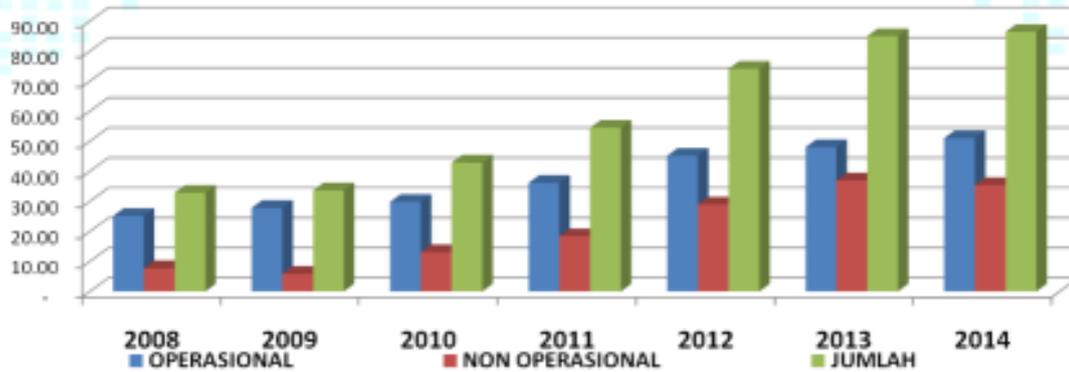
- UO KEMHAN Rp. 22.557.594.851.000,-
- UO Mabes TNI Rp. 5.481.323.724.000,-
- UO TNI AD Rp. 8.297.211.489.000,-
- UO TNI AL Rp. 4.979.047.244.000,-
- UO TNI AU Rp. 6.585.658.240.000,-



5



PERBANDINGAN PAGU OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI TA 2008-2013



Dalam Triliun Rupiah

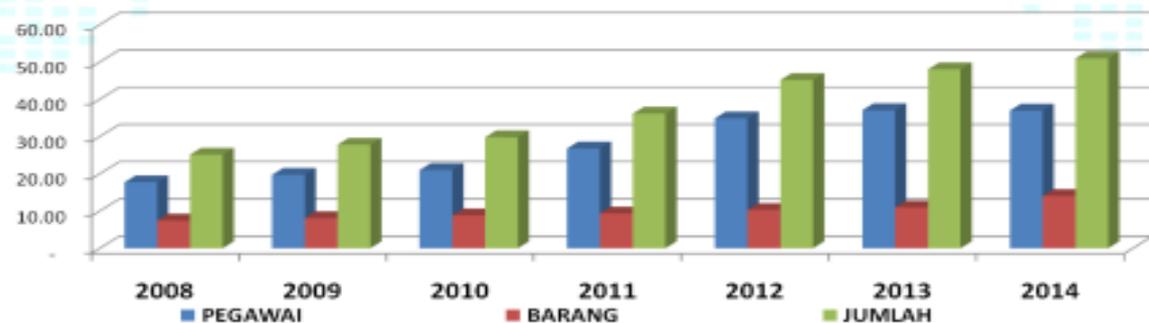
JENIS BELANJA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
OPERASIONAL	25.11	27.79	29.80	36.12	45.13	48.00	50.98
NON OPERASIONAL	7.75	5.87	13.09	18.37	28.97	36.95	35.39
JUMLAH	32.86	33.66	42.89	54.49	74.10	84.95	86.37
	76%	83%	69%	66%	61%	57%	59%
	24%	17%	31%	34%	39%	43%	41%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara prosentase, mulai TA 2010 terjadi pergeseran komposisi belanja dari operasional ke non operasional dari semula 31% menjadi 41% untuk belanja non operasional

7



PAGU BELANJA OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI TA 2008-2014



Dalam Triliun Rupiah

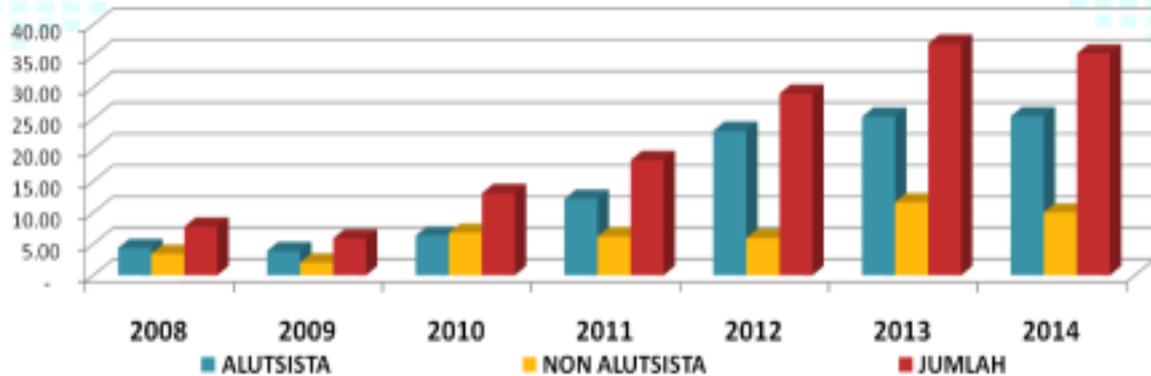
BEL OPERASIONAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BEL PEGAWAI	17.69	19.71	20.98	26.79	34.86	37.05	36.95
BEL BARANG	7.42	8.08	8.82	9.33	10.27	10.95	14.03
JUMLAH	25.11	27.79	29.80	36.12	45.13	48.00	50.98
	70%	71%	70%	74%	77%	77%	72%
	30%	29%	30%	26%	23%	23%	28%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara prosentase, terjadi pergeseran komposisi dari belanja barang ke belanja pegawai, dari semula 30% pada tahun 2008 menjadi 28% pada tahun 2014

9



PAGU BELANJA NON OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI TA 2008-2014



Dalam Triliun Rupiah

NON OPRS	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
ALUTSISTA	4.35	56%	3.86	66%	6.32	48%	12.19	66%	23.05	80%	25.30	68%	25.38	72%
NON ALUTSISTA	3.40	44%	2.01	34%	6.77	52%	6.18	34%	5.92	20%	11.65	32%	10.01	28%
JUMLAH	7.75	100%	5.87	100%	13.09	100%	18.37	100%	28.97	100%	36.95	100%	35.39	100%

CATATAN :

Alokasi untuk alutsista berasal dari PLN (FKE dan RMP), PDN, MEF dan Rupiah Murni alutsista dalam negeri pada Program Bangtekindhan

Secara prosentase, terjadi pergeseran komposisi belanja non operasional dari non alutsista ke alutsista, dari semula 44% pada tahun 2008 menjadi 28% pada tahun 2014



RENCANA DAN USULAN KEBUTUHAN PERCEPATAN PEMENUHAN MEF APBN TA 2011-2014



Dalam Triliun Rupiah

NO	UNIT ORGANISASI	2010	2011	2012	2013	2014	JUMLAH
1	DEPHAN/KEMHAN	2.89	-	-	-	-	2.89
2	MABES TNI	0.53	1.00	1.25	1.50	1.75	6.03
3	TNI AD	1.08	2.50	2.75	3.00	3.25	12.58
4	TNI AL	1.25	3.50	3.75	4.00	4.25	16.75
5	TNI AU	1.25	4.00	4.25	4.50	4.75	18.75
JUMLAH		7.00	11.00	12.00	13.00	14.00	57.00
DIPENUHI DLM DIPA		7.00	4.00	6.00	6.00	7.50	30.50

Pelaksanaan program dan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Beberapa program yang telah direncanakan seperti Program Pengembangan Pertahanan, Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI, Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dan Program Operasi Bhakti TNI telah terlaksana dengan baik, meskipun pencapaian kesiapan operasional satuan pada kondisi MEF belum dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan untuk mencapai batas MEF diperlukan kesiapan personel dan kesiapan materiil yang harus mencapai 60% dari kesiapan tempur satuan.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran TA.2013 Kementerian Pertahanan dan TNI dapat dirinci per sasaran sebagai berikut :

Dalam ribuan				
NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	25.000.000,-	25.000.000,-	100
2.	Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.	3.418.076,-	3.418.076,-	100
3.	Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.	10.010.400,-	10.010.400,-	100
4.	Wilayah laut dan udara yuridiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	1.043.239.728,-	1.043.239.728,-	100
5.	Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.	33.726.900,-	33.726.900,-	100
6.	Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	7.137.072,-	7.137.072,-	100
7.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang <i>up to date</i> dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	79.833.091,-	79.833.091,-	100

8.	Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.	6.000.000,-	6.000.000,-	100
9.	Seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.	505.973.686,-	505.973.686,-	100
10.	Pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.	248.251.072,-	248.251.072,-	100
11.	Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	1.400.000.000,-	1.400.000.000,-	100
12.	Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.	1.100.274.373,-	1.100.274.373,-	100
13.	Masyarakat memiliki sikap dan perilaku Bela Negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.	6.562.050,-	6.562.050,-	100
14.	Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan Nasional di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.	15.490.196,-	15.490.196,-	100

Secara umum Tahun 2013 Kemhan dan TNI telah berhasil menyerap 100% pagu anggaran yang tersedia. Tingkat capaian kinerja Kemhan dan TNI Tahun 2013 merupakan upaya untuk melengkapi kekuatan dan meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki dengan cara melaksanakan pemeliharaan yang lebih intensif, melengkapi personel dan Alutsista beserta alat peralatan pendukungnya, yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan anggaran yang disediakan pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

11. Kesimpulan.

LAKIP Kementerian Pertahanan TA. 2013 merupakan LAKIP Tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 dan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Pertahanan menuju *good governance* dengan mengacu pada RPJM Tahun 2010-2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagai penyelenggara dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, tugas penyelenggaraan di bidang pertahanan dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian Kementerian Pertahanan telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2013 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Peningkatan Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju kekuatan pokok minimum (MEF). Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara terus dimantapkan dan dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Matra Terpadu yang mampu melaksanakan operasi gabungan, memiliki kekuatan dan kemampuan serbu (*striking force*) sebagai pondasi untuk membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
- b. Mengoptimalkan dan memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan.
- c. Peningkatan pendayagunaan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian.
- d. Peningkatan koordinasi seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang dalam penanganan gangguan keamanan dan penegakan hukum di laut.

- e. Penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi udara dengan melalui Patroli Udara (Patud), Pengamatan dan Pengintaian Udara (Matud).
- f. Mengoptimalkan dan menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
- g. Peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- h. Peningkatan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui peningkatan sistem tata kelola tertentu.
- i. Peningkatan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun kebijakan di bidang keamanan nasional.

12. **Saran.**

- a. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk Kemhan dan TNI yang lebih memadai, sehingga pembangunan kekuatan pertahanan dapat lebih optimal. Diperlukan konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah (Keppres Nomor: 35 tahun 2011) dalam rangka pemenuhan anggaran MEF
- b. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan personel Kemhan dan TNI dalam upaya pencapaian profesionalisme personel Kemhan dan TNI.
- c. Perlu adanya peningkatan Belanja Barang pemeliharaan Alutsista dan pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan kebutuhan nyata/riil.
- d. Pemerintah agar mendorong BUMNIP untuk meningkatkan kemampuan produksi dengan melibatkan BUMN dan BUMS
- e. Pemerintah agar mendorong kementerian BUMN untuk berperan serta dalam menyiapkan infrastruktur Sarpras BUMNIP dalam rangka peningkatan kemampuan produksi Alutsista TNI.
- f. Perlu peningkatan peran serta Bank Pemerintah dalam rangka menyediakan pembiayaan pengadaan Alutsista TNI dari luar negeri.

Dengan disusunnya LAKIP TA. 2013 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. LAKIP tersebut dapat dijadikan pedoman untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan Visi Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Tangguh dan Misi Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa maka keberadaan Kementerian Pertahanan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jakarta, 12 Maret 2014

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,



FHB. Soelistyo, S.Sos
Marsekal Muda TNI

**LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA
KEMHAN RI TA. 2013**

Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Pertahanan Tahun 2013

(dalam ribuan)

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
							Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Seluruh Potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif	Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu.	78 %	78 %	100	Dukungan Kesiapan Pertahanan Matra Laut	25.000.000,-	25.000.000,-	100
2.	Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah	Persentase wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan <i>up-to-date</i> .	65 %	65 %	100	Strategi Pertahanan	3.418.076,-	3.418.076,-	100
3.	Seluruh wilayah terutama daerah terpencil dan perbatasan memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul	Persentase kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan untuk melakukan lapor dini (<i>early warning report</i>) terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang timbul,	55 %	55 %	100	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	10.010.400,-	10.010.400,-	100
4.	Wilayah Laut dan Udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan	Persentase penyelenggaraan operasi TNI AL dan TNI AU dlm rangka pengamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional	92 %	92 %	100	penggunaan kekuatan pertahanan integratif	1.043.239.728,-	1.043.239.728,-	100

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
							Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyelenggaraan operasi militer selain perang TNI AU dan TNI AL dalam penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional.	32%	32%	100		645.450.997,-	645.450.997,-	100
5.	Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman	Persentase cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30 %	30 %	100	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif	33.726.900,-	33.726.900,-	100
6.	Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta dikembangkan secara sinergis lintas sektor.	Prosentase kelengkapan legislasi bidang pertahanan Negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	65 %	65 %	100	Strategi Pertahanan	7.137.072,-	7.137.072,-	100
7.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data <i>up-to-date</i> dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Persentase satuan kerja yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.	60 %	60 %	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertahanan.	79.833,091,-	79.833,091,-	100
8.	Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dgn administrasi yang akuntabel sesuai SOP.	Persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang <i>up to date</i> dan akuntabel.,	78%	78 %	100	Dukungan Kesiapan Pertahanan Matra Laut	6.000.000,-	6.000.000,-	100

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
							Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Seluruh satuan kerja Kemhan/TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kopetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.	a. Persentase satuan kerja UO kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	80 %	80 %	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertahanan.	505.973.686,-	505.973.686,-	100
		b. Persentase satuan-satuan kerja TNI yang memiliki personel sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam TOP/DSPP.	22 %	22 %	100		48.588.773,-	48.588.773,-	100
10.	Pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang professional.	Persentase penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan.	80%	80%	100	Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	248.251.072,-	248.251.072,-	100
11.	Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir dan mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	Persentase produksi Alutsista Industri Dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan	30 %	30 %	100	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.400.000.000,-	1.400.000.000,-	100
12.	Sarana prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan lptek serta dikembangkan secara mandiri.	Persentase rekomendasi inovasi teknologi dan model alat pertahanan yang sesuai kemajuan lptek serta mampu dijadikan prototipe.	40%	40 %	100	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.	1.100.274.373,-	1.100.274.373,-	100

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
							Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela Negara Serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.	a.Persentase masyarakat yang telah mengalami pembentukan sikap dan perilaku bela negara/mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara (hasil survey)/ jumlah Operasi Teritorial-Manunggal Bantuan sosial yang dilaksanakan untuk operasi SAR TNI.	20 %	20 %	100	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif.	6.562.050,-	6.562.050,-	100
		b.Persentase komponen pendukung yang dipetakan dan dibina secara terintegrasi dengan data yang <i>up to date</i> , akurat dan siap digunakan.	40 %	40 %	100	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif.	8.840.809,-	8.840.809,-	100
14.	Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.	Persentase keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang.	65 %	65 %	100		15.490.196,-	15.490.196,-	100

Jakarta, 12 Maret 2014

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,



FHB. Soellisty, S.Sos
Marsekal Muda TNI